



UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

Alamat: Jalan Seroja 57, Tonja, Denpasar 80239

Telepon: 08113888814

Laman: www.mahadewa.ac.id

Posel: info@mahadewa.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
NOMOR: 1167/UPMI/VII/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM (MKWK) DAN
MATA KULIAH PENCIRI UNIVERSITAS (MKPU)**

**ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA IDA SANGHYANG WIDHI WASA,
TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu pembelajaran pada Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) dan Mata Kuliah Penciri Universitas yang berlaku bagi seluruh program studi, diperlukan pedoman yang menjadi acuan baku dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
- b. bahwa dinamika perkembangan regulasi pendidikan tinggi, kebutuhan masyarakat, serta komitmen universitas dalam membentuk lulusan yang berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing menuntut tersusunnya Buku Pedoman MKWK dan Mata Kuliah Penciri Universitas yang komprehensif, adaptif, dan selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dan memastikan penerapan pedoman secara konsisten, dipandang perlu menetapkan Buku Pedoman Mata Kuliah Wajib Kurikulum dan Mata Kuliah Penciri Universitas melalui Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Buku Pedoman Mata Kuliah Wajib Kurikulum dan Mata Kuliah Penciri Universitas.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- h. Surat Keputusan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali Nomor 024/YPLP-PT/IKIP PGRI Bali/V/2024 tentang Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Menetapkan **Buku Pedoman Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) dan Mata Kuliah Penciri Universitas (MKPU)** sebagai pedoman resmi dalam penyelenggaraan pembelajaran MKWK dan MKPU pada seluruh program studi di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

Kedua : Buku Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan baku dalam:

1. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah MKWK dan MK Penciri Universitas;
2. Pelaksanaan proses pembelajaran, baik tatap muka, daring, maupun *blended*;
3. Penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Dokumentasi dan pelaporan penyelenggaraan pembelajaran MKWK dan MK Wajib Institusi oleh program studi dan fakultas;
5. Pelaksanaan penjaminan mutu akademik oleh unit penjaminan mutu di tingkat universitas maupun fakultas.

Ketiga : Setiap dosen pengampu Mata Kuliah Wajib Kurikulum dan MK Penciri Universitas wajib mengimplementasikan pedoman ini secara konsisten dan bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan pembelajaran.

Keempat : Badan penjamin Mutu (BPM) UPMI mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan pedoman MKWK dan MK Penciri Universitas (MKPU) sebagai bagian dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

Kelima : Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis OBE:

1. Dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan Akademik bekerja sama dengan fakultas dan program studi;
2. Wajib melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal melalui forum kurikulum, tracer study, dan survey pengguna lulusan;
3. Didukung oleh sarana prasarana serta sistem informasi akademik yang memadai.

Keenam : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan atau keputusan rektor lainnya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di: Denpasar
 Pada tanggal: 24 Juli 2024
 Rektor

Prof. Dr. Drs. I Made Suarta, S.H., M.Hum
 NIP. 19621025 199102 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	4
KATA PENGANTAR	6
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang	8
B. Dasar Hukum.....	12
C. Tujuan.....	13
BAB II CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN RUANG LINGKUP MATA KULIAH WAJIB	14
A. Pendidikan Agama Islam	14
B. Pendidikan Agama Katolik	17
C. Pendidikan Agama Kristen Protestan.....	20
D. Pendidikan Agama Hindu	23
E. Pendidikan Agama Buddha	26
F. Pendidikan Pancasila	29
G. Pendidikan Kewarganegaraan.....	32
H. Bahasa Indonesia.....	35
I. Pendidikan Anti Korupsi	37
J. Kewirausahaan	40
K. Literasi Digital	43
L. Wawasan PGRI	46
M. Pendidikan Karakter dan Tri Hita Karana.....	50
BAB III PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MKWK	55
A. Proses Pembelajaran	55
1. Perencanaan Pembelajaran.....	55
2. Pelaksanaan Pembelajaran	56
3. Pengelolaan Kelas	58
4. Monitoring Dan Evaluasi Proses Pembelajaran.....	60
B. Metoda Pembelajaran MKWK.....	61
1. Prinsip umum:.....	61

2. Pendekatan dan Strategi Pembelajaran	63
3. Pemanfaatan Teknologi dan Media.....	65
4. Integrasi Nilai	67
BAB IV PENILAIAN PEMBELAJARAN MKWK	69
A. Definisi Penilaian Pembelajaran	69
1. Pengertian Penilaian Pembelajaran Dalam Konteks Pendidikan Tinggi	69
2. Fungsi Penilaian	69
3. Kedudukan Penilaian Sebagai Bagian Dari Sistem Penjaminan Mutu Akademik	70
B. Prinsip Penilaian.....	71
1. Sahih (valid).....	71
2. Objektif	71
3. Adil dan Transparan	71
4. Terencana dan Berkesinambungan.....	72
5. Akuntabel dan Dapat Dipertanggungjawabkan	72
6. Mendidik (educative) dan Memotivasi Belajar	72
7. Relevan dengan Capaian Pembelajaran (CPL dan CPMK).....	72
C. Teknik dan Instrumen Penilaian.....	73
1. Teknik Penilaian.....	73
2. Instrumen Penilaian.....	75
3. Kriteria dan Bobot Penilaian.....	77
D. Mekanisme dan Prosedur Penilaian	78
1. Perencanaan Penilaian dalam RPS	78
2. Pelaksanaan Penilaian.....	79
3. Pengolahan dan Pelaporan Nilai.....	81
4. Umpan Balik (Feedback) kepada Mahasiswa	83
5. Mekanisme Keberatan dan Klarifikasi Nilai oleh Mahasiswa	84
6. Dokumentasi dan Arsip Instrumen serta Hasil Penilaian	86
BAB V PENUTUP	88

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Pedoman Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) dan Mata Kuliah Penciri Universitas PGRI Mahadewa Indonesia ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berkomitmen melahirkan lulusan yang cerdas, berkarakter, dan berintegritas,

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memandang perlu adanya panduan tertulis yang komprehensif mengenai penyelenggaraan Mata Kuliah Wajib Kurikulum dan Mata Kuliah Penciri Universitas bukan sekadar kumpulan mata kuliah wajib, melainkan instrumen strategis untuk menginternalisasikan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus membentuk kepribadian mahasiswa sebagai insan akademik dan warga negara yang bertanggung jawab.

Sejalan dengan visi dan misi universitas, pembelajaran pada MKWK atau MK wajib Institusi diarahkan untuk menguatkan dimensi spiritual, moral, intelektual, dan sosial mahasiswa. Melalui mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Anti Korupsi. Mata Kuliah Penciri Universitas, meliputi mata kuliah Pendidikan Karakter dan Tri Hita Karana, Pendidikan Anti Korupsi, Literasi Digital, Wawasan PGRI, dan Kewirahusahaan. Mata kuliah tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran kritis, sikap toleran, kecintaan terhadap tanah air, kemampuan berkomunikasi ilmiah, serta komitmen kuat terhadap nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi. MKWK dan Mata Kuliah Penciri Universitas berperan penting dalam menghubungkan penguasaan keilmuan dengan pembentukan karakter dan integritas pribadi.

Penyusunan buku pedoman ini juga merupakan respons terhadap berbagai regulasi nasional di bidang pendidikan tinggi, sekaligus bagian dari upaya penjaminan mutu internal. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama bagi:

1. Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi dalam merumuskan kebijakan akademik dan pengelolaan pembelajaran MKWK dan Mata Kuliah Penciri Universitas.
2. Dosen pengampu MKWK dan Mata Kuliah Penciri Universitas dalam menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS), melaksanakan pembelajaran, dan melakukan penilaian secara terencana, objektif, dan akuntabel.

3. Mahasiswa, agar memperoleh pemahaman yang jelas mengenai tujuan, capaian pembelajaran, ruang lingkup materi, proses pembelajaran, dan mekanisme penilaian pada setiap MKWK dan Mata Kuliah Penciri Universitas.

Struktur buku pedoman ini disusun secara sistematis. Bab I menguraikan latar belakang, dasar hukum, dan tujuan penyusunan pedoman. Bab II menjelaskan capaian pembelajaran dan ruang lingkup masing-masing mata kuliah wajib. Bab III membahas pelaksanaan pembelajaran MKWK, termasuk proses dan metode pembelajaran yang dianjurkan. Bab IV memaparkan prinsip, teknik, dan mekanisme penilaian pembelajaran MKWK. Akhirnya, Bab V memuat penutup yang menegaskan kembali pentingnya implementasi pedoman ini secara konsisten dan berkelanjutan.

Penyusunan buku pedoman ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim penyusun, para pakar dan dosen pengampu MKWK serta Mata Kuliah Penciri Universitas, serta unit-unit terkait di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang telah memberikan kontribusi pemikiran maupun tenaga.

Kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih mungkin memerlukan penyempurnaan seiring perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pendidikan tinggi, serta dinamika kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas pedoman ini pada masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami agar **Buku Pedoman Mata Kuliah Wajib Kurikulum dan Mata Kuliah Penciri Universitas** ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan menjadi acuan dalam mewujudkan proses pembelajaran yang bermutu, berkarakter, dan berdaya saing, demi tercapainya lulusan yang unggul dan berintegritas.

Denpasar,

Tim Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran perguruan tinggi tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan insan akademik yang utuh, yakni pribadi yang berkarakter sekaligus berdaya saing. Kampus menjadi ruang sosialisasi nilai, tempat mahasiswa belajar memadukan kemampuan berpikir kritis dengan kepekaan moral dan sosial. Melalui kurikulum, budaya akademik, dan iklim kehidupan kampus, perguruan tinggi menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja sama, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut menyatu dengan proses penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga lulusan tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki kompas etik yang jelas dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan cara ini, perguruan tinggi berperan sebagai wahana pembentukan karakter yang tidak bersifat indoktrinatif, melainkan tumbuh melalui pembiasaan, refleksi kritis, dan keteladanan sivitas akademika.

Di saat yang sama, perguruan tinggi dituntut melahirkan lulusan yang mampu bersaing pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Daya saing tidak hanya diukur dari kemampuan intelektual dan keterampilan profesional, tetapi juga dari keluwesan beradaptasi, kreativitas, kemampuan berkomunikasi, serta kemauan untuk terus belajar sepanjang hayat. Melalui pembelajaran yang berbasis riset, kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri, serta pemanfaatan teknologi digital, mahasiswa dilatih untuk menghadapi dinamika perubahan dan kompleksitas persoalan nyata di masyarakat. Kombinasi antara karakter yang kuat dan kompetensi yang unggul inilah yang menjadikan peran perguruan tinggi sangat strategis dalam menyiapkan generasi yang tidak sekadar siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang memajukan kehidupan bangsa secara bermartabat.

Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) dan Mata Kuliah Penciri Universitas (MKPU) menempati posisi strategis dalam upaya penguatan jati diri kebangsaan di lingkungan perguruan tinggi. Melalui mata kuliah seperti Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama, mahasiswa diajak memahami kembali sejarah, nilai, dan cita-cita yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses pembelajaran tidak hanya diarahkan pada penguasaan konsep secara kognitif, tetapi juga pada penghayatan makna kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap cinta tanah air, penghormatan terhadap simbol negara, dan kesediaan berkontribusi bagi kemajuan

masyarakat. Dengan demikian, MKWK dan MKPU berfungsi sebagai wahana sistematis untuk menumbuhkan kesadaran bahwa identitas sebagai warga negara Indonesia tidak terlepas dari tanggung jawab moral dan sosial yang harus diemban oleh setiap insan akademik.

Di sisi lain, MKWK dan MKPU berperan penting dalam penginternalisasian nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan sebagai landasan hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. Melalui diskusi, studi kasus, dan refleksi kritis, mahasiswa didorong untuk melihat Pancasila bukan sekadar dokumen normatif, tetapi sebagai pedoman etis yang relevan dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer, seperti intoleransi, radikalisme, ketidakadilan sosial, dan praktik koruptif. Pembelajaran MKWK dan MKPU juga menjadi ruang dialog antarpemeluk agama, suku, budaya, dan pandangan politik yang berbeda, sehingga mahasiswa terbiasa menghargai perbedaan dan mengelola keragaman secara dewasa. Pengalaman belajar yang demikian diharapkan dapat membentuk sikap inklusif, moderat, dan terbuka, yang menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya kehidupan berbangsa yang rukun dan demokratis.

Selanjutnya, MKWK dan MKPU berkontribusi langsung pada pembinaan moral, etika, dan spiritual mahasiswa. Melalui integrasi antara ajaran agama, nilai kebajikan universal, dan kode etik profesi, mahasiswa dipandu untuk memahami konsekuensi moral dari setiap tindakan yang diambil, baik di lingkungan akademik maupun di tengah masyarakat. Pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada “apa yang diketahui” tetapi juga “bagaimana seharusnya bersikap” membantu mahasiswa membangun kepekaan nurani, sikap jujur, tanggung jawab, serta kesediaan untuk menjauhi perilaku menyimpang, termasuk korupsi, plagiarisme, dan kekerasan. Dengan cara ini, MKWK dan MKPU bukan sekadar rangkaian mata kuliah formal, melainkan instrumen pembinaan kepribadian yang menyeimbangkan dimensi pengetahuan, karakter, dan spiritualitas, sehingga lulusan perguruan tinggi tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan batin.

Pengaturan mengenai mata kuliah wajib di perguruan tinggi tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi merupakan amanat langsung dari berbagai regulasi nasional di bidang pendidikan tinggi. Undang-undang, peraturan pemerintah, hingga kebijakan menteri telah menegaskan bahwa perguruan tinggi wajib mengintegrasikan mata kuliah tertentu yang berkaitan dengan agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia sebagai bagian dari kurikulum setiap program studi. Di samping itu untuk mendukung visi UPMI yakni “Unggul dan

Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030” dan perkembangan teknologi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh lulusan, tanpa memandang bidang keilmuan, memiliki landasan nilai, wawasan kebangsaan, dan kemampuan berbahasa yang memadai. Di sisi lain, kebijakan tentang standar nasional pendidikan tinggi juga mengatur capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum, yang sebagian diantaranya hanya dapat dipenuhi secara optimal melalui penyelenggaraan mata kuliah wajib nasional dan universitas.

Dalam konteks tersebut, universitas tidak memiliki keleluasaan penuh untuk sekadar menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja atau kecenderungan global semata, tetapi juga harus menunjukkan kepatuhan terhadap kerangka hukum yang berlaku. Regulasi nasional menuntut adanya kejelasan beban SKS, rumusan capaian pembelajaran, serta mekanisme penjaminan mutu untuk setiap mata kuliah wajib yang diselenggarakan. Selain mata kuliah wajib nasional, perguruan tinggi juga didorong mengembangkan mata kuliah wajib universitas yang mencerminkan kekhasan visi, misi, dan nilai institusi, seperti pendidikan anti korupsi, karakter, atau ke-PGRI-an. Dengan demikian, tuntutan regulasi tidak hanya bersifat administratif, melainkan menjadi pendorong bagi perguruan tinggi, termasuk Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, untuk merancang dan mengelola Mata Kuliah Wajib Kurikulum secara lebih sistematis, terukur, dan akuntabel, sekaligus tetap relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Fenomena degradasi moral, intoleransi, kekerasan, dan korupsi yang muncul di berbagai lapisan masyarakat menunjukkan bahwa persoalan bangsa Indonesia hari ini tidak semata-mata terletak pada kurangnya pengetahuan, tetapi juga pada rapuhnya karakter dan kepekaan nurani. Maraknya ujaran kebencian, perundungan (*bullying*), kekerasan berbasis identitas, serta praktik-praktik tidak jujur dalam ranah birokrasi maupun kehidupan sehari-hari memperlihatkan adanya jarak antara nilai-nilai luhur yang diajarkan secara normatif dengan perilaku nyata di lapangan. Di kalangan generasi muda, termasuk mahasiswa, gejala ini dapat terlihat dari sikap apatis terhadap persoalan publik, kecenderungan menyederhanakan masalah secara hitam-putih, serta lemahnya kemampuan mengelola perbedaan. Situasi tersebut menjadi alarm bagi dunia pendidikan tinggi bahwa proses pembelajaran yang menekankan aspek kognitif saja tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan moral dan sosial yang sedang dihadapi bangsa.

Pada saat yang sama, perguruan tinggi beroperasi dalam konteks era digital dan globalisasi yang membawa peluang besar sekaligus tantangan berat. Teknologi informasi

memungkinkan akses pengetahuan yang nyaris tak terbatas, membuka ruang kolaborasi lintas negara, serta mempercepat pertukaran gagasan. Namun, di balik itu, muncul pula berbagai dampak negatif seperti banjir informasi yang sulit diverifikasi, penyebaran hoaks, polarisasi opini di media sosial, dan kecenderungan konsumsi konten instan yang mengikis kedalaman berpikir. Globalisasi juga mendorong kompetisi yang semakin ketat di pasar kerja, sehingga lulusan dituntut tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga memiliki daya tahan mental, kelenturan budaya, dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Tanpa landasan karakter yang kuat, kemajuan teknologi dan keterbukaan global justru berisiko memperlebar jurang ketimpangan dan memperparah krisis identitas di kalangan generasi muda.

Dalam konteks kondisi dan tantangan aktual tersebut, perguruan tinggi, termasuk Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, tidak dapat sekadar menjadi penyedia ijazah atau institusi yang berkatat pada pengembangan keilmuan teknis. Kampus harus hadir sebagai ruang pembentukan insan yang mampu memanfaatkan kemajuan era digital dan arus globalisasi secara kritis dan bertanggung jawab, sekaligus memiliki keberanian moral untuk menolak praktik kekerasan, intoleransi, dan korupsi dalam bentuk apa pun. Tantangan-tantangan ini menegaskan pentingnya penguatan peran kurikulum, khususnya melalui Mata Kuliah Wajib Kurikulum, sebagai sarana menanamkan nilai, memperluas wawasan kebangsaan, dan membangun karakter mahasiswa yang tidak mudah goyah oleh tekanan zaman. Dengan cara itulah perguruan tinggi dapat berkontribusi nyata dalam mengatasi krisis moral dan sosial yang tengah dihadapi bangsa.

Penyusunan pedoman Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) dan Mta Kuliah Wajib Institusi (MKPU) menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda jika perguruan tinggi ingin menjamin bahwa proses pendidikan berjalan secara terarah, konsisten, dan bertanggung jawab. Tanpa adanya acuan tertulis yang jelas, pelaksanaan MKWK dan MKPU berpotensi berlangsung secara berbeda-beda antar dosen, program studi, bahkan antar angkatan mahasiswa. Perbedaan ini bukan hanya dalam hal metode mengajar, tetapi juga dapat menyentuh aspek yang lebih mendasar, seperti penetapan capaian pembelajaran, kedalaman materi, serta standar penilaian. Pedoman MKWK dan MKPU berfungsi sebagai rujukan baku dalam perencanaan, mulai dari penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), pemilihan pendekatan dan media pembelajaran, hingga penentuan bentuk tugas dan ujian. Dengan adanya kerangka yang seragam, dosen memiliki panduan yang jelas dalam mengelola pembelajaran, sementara mahasiswa memperoleh kepastian mengenai tujuan dan alur belajar yang akan ditempuh.

Lebih jauh, pedoman MKWK dan MKPU juga berperan sebagai instrumen penting dalam penjaminan mutu pembelajaran. Di era ketika akuntabilitas publik terhadap perguruan tinggi semakin tinggi, setiap penyelenggaraan mata kuliah dituntut dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun administratif. Pedoman yang disusun secara sistematis memungkinkan universitas melakukan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan MKWK dan MKPU. Melalui dokumen ini, lembaga penjaminan mutu internal memiliki dasar yang kuat untuk menilai apakah proses pembelajaran telah selaras dengan standar nasional pendidikan tinggi, visi-misi universitas, dan nilai-nilai yang hendak ditanamkan, seperti integritas, kebhinekaan, dan anti korupsi. Di sisi lain, pedoman juga menjadi rujukan saat dilakukan audit mutu, akreditasi, ataupun peninjauan kembali kurikulum, sehingga keberlangsungan dan peningkatan kualitas MKWK tidak bersifat sporadis, melainkan berjalan secara terencana dan berkesinambungan. Dengan demikian, penyusunan pedoman MKWK bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi langkah strategis untuk memastikan bahwa peran MKWK dalam pembentukan karakter dan kompetensi mahasiswa betul-betul terwujud dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri terkait kurikulum dan pembelajaran di perguruan tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
9. Surat Keputusan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali Nomor 024/YPLP-PT/IKIP PGRI Bali/V/2024 tentang Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

C. Tujuan

Penyusunan Buku Pedoman Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) dan Mata Kuliah Penciri Universitas (MKPU) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia bertujuan untuk:

- 1) Menjadi acuan baku bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran MKWK dan MKPU secara sistematis dan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.
- 2) Menjamin konsistensi capaian pembelajaran, ruang lingkup materi, metode pembelajaran, dan prinsip penilaian MKWK dan MKPU di seluruh fakultas dan program studi.
- 3) Memfasilitasi pengintegrasian nilai-nilai dasar, termasuk nilai Pancasila, kebhinekaan, toleransi, integritas, anti korupsi, serta etika akademik dalam setiap proses pembelajaran MKWK dan MKPU.
- 4) Meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar melalui pedoman yang memuat standar minimal terkait perencanaan pembelajaran, penyusunan RPS, strategi pembelajaran aktif, dan pemanfaatan teknologi pendidikan.
- 5) Menjadi instrumen penjaminan mutu internal, yang memungkinkan monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan MKWK dan MKPU sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan kebijakan universitas.
- 6) Memberikan kejelasan bagi mahasiswa mengenai tujuan, capaian pembelajaran, struktur materi, metode pembelajaran, dan mekanisme penilaian pada seluruh MKWK dan MKPU yang wajib diikuti.
- 7) Mendukung pencapaian profil lulusan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang memiliki keunggulan akademik, karakter kuat, dan daya saing global, melalui pembelajaran berbasis nilai dan kompetensi.
- 8) Menyediakan dasar pengambilan keputusan pada tingkat universitas terkait pengembangan kurikulum, peningkatan mutu pembelajaran, serta penjaminan mutu akademik yang berkelanjutan.

BAB II

CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN RUANG LINGKUP MATA KULIAH WAJIB

A. Pendidikan Agama Islam

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Pendidikan Agama Islam dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif tentang ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta tradisi keilmuan Islam yang berkembang sepanjang sejarah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajak tidak hanya mengenal ajaran secara normatif, tetapi juga memaknai relevansinya dalam konteks kehidupan pribadi, sosial, kebangsaan, dan kemanusiaan. Pembelajaran difokuskan pada penguatan keimanan dan ketakwaan, pembentukan akhlak mulia, serta pengembangan cara pandang yang moderat, toleran, dan terbuka terhadap perbedaan. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam diharapkan mampu menjadi fondasi spiritual dan moral yang menopang pengembangan ilmu pengetahuan dan profesionalitas mahasiswa sebagai calon sarjana yang berintegritas.

2. Kedudukan dalam Kurikulum dan SKS

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa beragama Islam di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, tanpa memandang program studi atau bidang keilmuan yang ditekuni. Mata kuliah ini umumnya ditempatkan pada semester-semester awal studi, sehingga dapat menjadi dasar pembentukan karakter dan cara pandang keislaman mahasiswa sejak awal memasuki dunia akademik. Beban belajar mata kuliah ditetapkan dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku di universitas, dan menjadi bagian integral dari pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, khususnya pada ranah sikap dan nilai, serta pengetahuan umum keagamaan.

3. Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti mata kuliah Pendidikan Agama Islam, diharapkan mahasiswa mencapai capaian mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, serta kepribadian yang baik sesuai nilai-nilai Pancasila; berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air dan bahasa nasional serta mendukung perdamaian dunia; mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan

lingkungannya; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama, serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas (CPL-01) yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

1) Sikap dan nilai (iman, taqwa, akhlak mulia)

- a) Menunjukkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT yang tercermin dalam kesadaran beribadah, kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Menampilkan akhlak mulia dalam pergaulan di kampus dan masyarakat, seperti sikap santun, menghargai orang lain, menepati janji, dan menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
- c) Mengembangkan komitmen pribadi untuk senantiasa memperbaiki diri (tazkiyatunnafs) dan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan etika dalam pengambilan keputusan.

2) Pengetahuan keislaman dasar

- a) Memahami pokok-pokok ajaran Islam yang meliputi aspek akidah, ibadah, dan akhlak secara benar dan proporsional.
- b) Menguasai pengetahuan dasar tentang sumber hukum Islam, prinsip-prinsip syariah, serta pandangan Islam terhadap manusia, alam, dan kehidupan.
- c) Mengetahui secara umum bagaimana ajaran Islam memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keluarga, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kehidupan berbangsa.

3) Keterampilan berpikir kritis terhadap isu-isu keislaman kontemporer

- a) Mampu menganalisis berbagai isu keislaman yang berkembang di masyarakat, seperti radikalisme, intoleransi, konflik identitas, maupun problem etika dalam penggunaan teknologi modern.
- b) Mampu membedakan antara ajaran Islam yang bersifat prinsip dengan pendapat atau tafsir yang bersifat ijtihadi, sehingga terhindar dari sikap fanatik sempit dan cara pandang yang ekstrem.
- c) Mampu mengemukakan pendapat secara logis, argumentatif, dan santun berdasarkan kaidah keilmuan dan sumber ajaran Islam yang otoritatif ketika merespon fenomena keagamaan di ruang publik.

4. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi mata kuliah Pendidikan Agama Islam mencakup, namun tidak terbatas pada, pokok-pokok bahasan berikut:

1) Akidah, ibadah, akhlak

- a) Konsep tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qada dan qadar.
- b) Prinsip-prinsip ibadah mahdhah (seperti shalat, puasa, zakat, dan haji) serta hikmah pelaksanaannya dalam pembentukan kedisiplinan dan kepedulian sosial.
- c) Akhlak terpuji (mahmudah) dan akhlak tercela (mazmumah), serta penerapannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, kampus, dan masyarakat.

2) Islam dan ilmu pengetahuan

- a) Pandangan Islam tentang ilmu, ulama, dan pencarian kebenaran ilmiah.
- b) Sejarah singkat kontribusi ilmuwan Muslim dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban.
- c) Etika keilmuan dalam perspektif Islam, termasuk kejujuran akademik, anti plagiarisme, dan tanggung jawab moral dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3) Islam dan kemajemukan

- a) Konsep ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah dalam membangun kerukunan sosial.
- b) Sikap Islam terhadap keberagaman agama, budaya, suku, dan pandangan politik di Indonesia.
- c) Moderasi beragama (wasathiyah) sebagai pendekatan untuk menghindari ekstremisme dan intoleransi, serta peran Muslim dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

4) Islam dan anti korupsi

- a) Tinjauan ajaran Islam tentang kejujuran, amanah, dan larangan keras terhadap segala bentuk kecurangan, penipuan, dan pengkhianatan.
- b) Pengertian dan bentuk-bentuk korupsi dalam kehidupan modern, beserta dampaknya terhadap keadilan sosial dan pembangunan bangsa.
- c) Internalisasi nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam diri mahasiswa sebagai calon intelektual dan pemimpin masa depan, serta upaya

konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi di lingkungan kampus dan masyarakat.

B. Pendidikan Agama Katolik

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Pendidikan Agama Katolik dimaksudkan untuk menolong mahasiswa beragama Katolik menghayati imannya secara lebih dewasa, kritis, dan bertanggung jawab dalam konteks kehidupan pribadi maupun sosial. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajak mendalami ajaran dasar Gereja Katolik yang bersumber dari Kitab Suci, Tradisi, dan Magisterium, serta memahami bagaimana ajaran tersebut diterapkan dalam realitas hidup sehari-hari. Proses pembelajaran tidak hanya menekankan aspek pengetahuan doktrinal, tetapi juga pembentukan hati nurani, kepekaan sosial, dan semangat pelayanan. Dengan demikian, Pendidikan Agama Katolik diharapkan mampu menjadi sarana pembinaan iman yang menumbuhkan pribadi yang rendah hati, adil, peduli terhadap sesama, serta siap terlibat secara aktif dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Kedudukan dalam Kurikulum dan SKS

Pendidikan Agama Katolik merupakan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) yang diperuntukkan bagi mahasiswa beragama Katolik di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Mata kuliah ini menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya perguruan tinggi dalam mengembangkan dimensi spiritual dan moral mahasiswa, di samping pengembangan kompetensi akademik dan profesional. Secara umum, mata kuliah ini ditempatkan pada semester awal, sehingga dapat memberikan fondasi nilai dan sikap sejak dini bagi perjalanan studi mahasiswa. Beban belajar dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) dan diperhitungkan dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, terutama pada aspek sikap, nilai, dan pengetahuan umum keagamaan yang wajib dimiliki seluruh lulusan perguruan tinggi.

3. Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti mata kuliah Pendidikan Agama Katolik, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, serta kepribadian yang baik sesuai nilai-nilai Pancasila; berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air dan bahasa nasional serta mendukung perdamaian dunia; mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;

menghargai keanegaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama, serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas (CPL-01) yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

1) Sikap dan nilai (iman, taqwa, akhlak mulia)

- a) Menghayati iman Kristiani menurut tradisi Gereja Katolik, yang tercermin dalam relasi pribadi dengan Allah, keterlibatan dalam kehidupan menggereja, dan komitmen untuk hidup sesuai Injil.
- b) Menunjukkan sikap moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian terhadap sesama, serta penghormatan terhadap martabat setiap manusia.
- c) Mengembangkan kepekaan hati nurani dan kesediaan untuk terus bertobat, memperbaiki diri, dan menjadikan nilai-nilai Injil sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di lingkungan kampus maupun masyarakat.

2) Pengetahuan keagamaan Katolik dasar

- a) Memahami pokok-pokok ajaran iman Katolik, termasuk pemahaman tentang Allah Tritunggal, Yesus Kristus, Roh Kudus, Gereja, sakramen-sakramen, dan hidup kekal.
- b) Menguasai pengetahuan dasar tentang Kitab Suci, Tradisi, dan Magisterium sebagai tiga pilar utama ajaran Gereja Katolik, serta cara Gereja menafsir dan mengajar sepanjang sejarah.
- c) Mengetahui ajaran sosial Gereja Katolik, terutama yang berkaitan dengan martabat manusia, keadilan sosial, perdamaian, dan tanggung jawab terhadap ciptaan.

3) Keterampilan berpikir kritis terhadap isu-isu keagamaan kontemporer

- a) Mampu menganalisis berbagai persoalan moral dan sosial kontemporer (seperti ketidakadilan, kemiskinan, kekerasan, korupsi, kerusakan lingkungan, dan intoleransi) dalam terang ajaran Gereja Katolik.
- b) Mampu membedakan antara ajaran resmi Gereja, tradisi-devosi, dan opini pribadi, sehingga tidak mudah terjebak dalam pandangan yang sempit atau menyesatkan.

- c) Mampu menyampaikan pendapat secara argumentatif, dialogis, dan penuh hormat dalam diskusi mengenai isu-isu keagamaan dan kemanusiaan, baik di ruang akademik maupun di ruang publik.

4. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi mata kuliah Pendidikan Agama Katolik meliputi pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

a. Kitab Suci dan Ajaran Gereja

- Pengantar Kitab Suci: struktur, jenis tulisan, dan cara membaca Kitab Suci dalam tradisi Katolik.
- Pokok ajaran iman menurut Syahadat (Credo) dan rumusan ajaran Gereja sepanjang sejarah.
- Peran Magisterium (ajaran resmi Gereja) dan Tradisi dalam menjaga kemurnian iman dan menanggapi tantangan zaman.

b. Moral dan etika Katolik

- Pengertian moral Kristen dan peran hati nurani dalam pengambilan keputusan yang benar.
- Prinsip-prinsip dasar etika Katolik, seperti kasih, keadilan, solidaritas, subsidiaritas, dan penghormatan terhadap kehidupan.
- Penerapan etika Katolik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan keluarga, kampus, dunia kerja, dan masyarakat luas.

c. Gereja, masyarakat, dan keadilan sosial

- Pemahaman tentang Gereja sebagai umat Allah, tubuh Kristus, dan sakramen keselamatan bagi dunia.
- Ajaran sosial Gereja Katolik mengenai martabat manusia, kesejahteraan umum, hak dan kewajiban, serta keadilan dan perdamaian.
- Peran orang Katolik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, termasuk keterlibatan dalam upaya membangun kehidupan sosial yang damai, adil, dan menghargai keberagaman.

d. Spiritualitas pelayanan dan integritas (anti korupsi)

- Spiritualitas pelayanan (diakonia) sebagai wujud konkret iman yang bekerja melalui kasih, terutama kepada mereka yang lemah, miskin, dan tersisih.
- Pandangan Gereja Katolik tentang dosa struktural, ketidakadilan, dan korupsi sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap martabat manusia dan kebaikan bersama.

- Penanaman nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam diri mahasiswa sebagai calon profesional dan pemimpin, serta langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan untuk menolak dan mencegah praktik koruptif di lingkungan kampus maupun masyarakat.

C. Pendidikan Agama Kristen Protestan

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Pendidikan Agama Kristen (Protestan) bertujuan membantu mahasiswa beragama Kristen Protestan mengembangkan pemahaman iman yang kokoh, kritis, serta relevan dengan dinamika kehidupan masa kini. Mata kuliah ini mengajak mahasiswa untuk mendalami ajaran Alkitab, pokok-pokok iman Kristen, serta refleksi teologis terhadap berbagai persoalan manusia dan masyarakat. Proses pembelajaran tidak hanya berhenti pada penguasaan konsep teologis, tetapi diarahkan pada pembentukan karakter Kristiani yang nyata dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Melalui dialog, studi kasus, dan refleksi personal, mahasiswa diajak melihat bagaimana iman kepada Kristus mendorong mereka untuk hidup sebagai saksi kasih, pembawa damai, dan pelayan di tengah masyarakat majemuk. Dengan demikian, Pendidikan Agama Kristen (Protestan) diharapkan menjadi ruang pembinaan iman yang menyatukan dimensi spiritual, moral, intelektual, dan sosial secara seimbang.

2. Kedudukan dalam Kurikulum dan SKS

Pendidikan Agama Kristen (Protestan) merupakan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) bagi seluruh mahasiswa yang beragama Kristen Protestan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Mata kuliah ini menjadi bagian dari upaya universitas dalam memastikan bahwa setiap mahasiswa memperoleh pembinaan keagamaan sesuai keyakinannya, di samping pengembangan kemampuan akademik dan profesional. Secara umum, mata kuliah ini ditempatkan pada semester awal agar dapat membentuk dasar nilai, sikap, dan pola pikir sejak awal masa studi. Beban belajar dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai ketentuan kurikulum, dan berkontribusi pada pencapaian profil lulusan, khususnya pada ranah sikap dan nilai, serta pengetahuan keagamaan umum yang diwajibkan bagi lulusan perguruan tinggi.

3. Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti mata kuliah Pendidikan Agama Kristen (Protestan), mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan keimanan dan

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, serta kepribadian yang baik sesuai nilai-nilai Pancasila; berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air dan bahasa nasional serta mendukung perdamaian dunia; mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama, serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas (CPL-01) yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

a. Sikap dan nilai (iman, ketaatan, karakter Kristiani)

- 1) Menghayati iman kepada Yesus Kristus sebagai dasar hidup, yang tercermin dalam relasi pribadi dengan Tuhan, ketekunan berdoa, keterlibatan di gereja, dan kesediaan untuk hidup menurut firman Tuhan.
- 2) Menunjukkan karakter Kristiani dalam kehidupan sehari-hari, seperti kasih, kerendahan hati, kejujuran, kesabaran, pengampunan, dan rasa hormat terhadap martabat setiap orang.
- 3) Mengembangkan hati nurani yang peka terhadap ketidakadilan, penderitaan, dan pelanggaran nilai kemanusiaan, serta termotivasi untuk mengambil bagian dalam upaya memperbaiki situasi tersebut.

b. Pengetahuan keagamaan Kristen dasar

- 1) Memahami pokok-pokok iman Kristen menurut tradisi Protestan, termasuk pemahaman tentang Allah Tritunggal, karya keselamatan dalam Yesus Kristus, peran Roh Kudus, gereja, dan pengharapan akan hidup yang kekal.
- 2) Menguasai pengetahuan dasar tentang Alkitab, struktur dan jenis tulisannya, serta cara menafsirkan teks secara bertanggung jawab dalam konteks teologi Protestan.
- 3) Mengetahui prinsip-prinsip etika Kristen dan ajaran tentang panggilan orang percaya dalam keluarga, dunia kerja, masyarakat, dan kehidupan berbangsa.

c. Keterampilan berpikir kritis terhadap isu-isu keagamaan dan sosial kontemporer

- 1) Mampu menganalisis berbagai persoalan moral dan sosial (seperti kemiskinan, kekerasan, intoleransi, kerusakan lingkungan, korupsi, dan ketimpangan sosial) dalam terang iman Kristen dan nilai-nilai Injil.
- 2) Mampu membedakan antara inti ajaran iman Kristen dengan tradisi budaya, kebiasaan lokal, atau pendapat pribadi, sehingga tidak mudah terjebak dalam sikap eksklusif, fanatik sempit, atau diskriminatif.

- 3) Mampu menyampaikan pandangan secara argumentatif, dialogis, dan penuh hormat dalam diskusi tentang isu-isu agama, etika, dan kemasyarakatan, baik di lingkungan kampus maupun ruang publik.

4. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi mata kuliah Pendidikan Agama Kristen (Protestan) meliputi pokok-pokok bahasan berikut:

a. Alkitab dan pokok-pokok iman Kristen

- 1) Pengantar Alkitab: kanon, struktur Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, serta ragam tulisan (narasi, puisi, nubuat, surat, dan lain-lain).
- 2) Pokok-pokok iman Kristen menurut pengakuan iman gereja: Allah Tritunggal, karya keselamatan dalam Yesus Kristus, peran Roh Kudus, gereja, dan hidup kekal.
- 3) Prinsip-prinsip dasar penafsiran Alkitab (hermeneutika sederhana) untuk membantu mahasiswa membaca dan menerapkan firman Tuhan secara relevan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Teologi dan etika Kristen

- 1) Konsep manusia menurut iman Kristen: diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, namun jatuh dalam dosa dan dipanggil untuk dipulihkan.
- 2) Prinsip etika Kristen yang berpusat pada kasih, keadilan, kebenaran, dan perdamaian.
- 3) Penerapan etika Kristen dalam berbagai dimensi kehidupan: relasi pribadi, keluarga, dunia kerja, penggunaan teknologi, dan pengelolaan sumber daya alam.

c. Kekristenan dan masyarakat majemuk

- 1) Gereja dan orang Kristen di tengah masyarakat plural yang terdiri dari berbagai agama, suku, budaya, dan pandangan politik.
- 2) Sikap dialogis dan inklusif sebagai wujud kesaksian iman yang menghargai kebebasan beragama dan martabat setiap manusia.
- 3) Peran orang Kristen dalam membangun kerukunan, menjembatani perbedaan, serta menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan ujaran kebencian.

d. Tanggung jawab sosial dan integritas (anti korupsi)

- 1) Panggilan orang percaya sebagai garam dan terang dunia, yang diwujudkan melalui kepedulian terhadap keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan pelestarian ciptaan.
- 2) Pandangan iman Kristen terhadap dosa struktural, ketidakjujuran, dan korupsi sebagai bentuk pelanggaran terhadap kehendak Allah dan kerusakan relasi dengan sesama.

- 3) Penguatan nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam diri mahasiswa sebagai calon profesional dan pemimpin masa depan, serta langkah-langkah praktis untuk menolak dan melawan perilaku koruptif di lingkungan kampus maupun masyarakat.

D. Pendidikan Agama Hindu

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Pendidikan Agama Hindu disusun untuk membantu mahasiswa beragama Hindu memahami dan menghayati ajaran agamanya secara utuh, rasional, dan relevan dengan kehidupan masa kini. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajak mendalami pokok-pokok ajaran Hindu yang meliputi tattwa (filsafat), susila (etika), dan upacara (ritual), serta kearifan lokal yang hidup dalam tradisi masyarakat Hindu, khususnya di Indonesia. Pembelajaran tidak hanya menekankan hafalan konsep, tetapi mengarahkan mahasiswa pada proses refleksi dan internalisasi nilai-nilai dharma, seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama serta lingkungan. Dengan demikian, Pendidikan Agama Hindu diharapkan menjadi landasan spiritual dan moral yang menopang pengembangan kepribadian dan profesionalitas mahasiswa sebagai insan akademik yang berintegritas dan berbudaya.

2. Kedudukan dalam Kurikulum dan SKS

Pendidikan Agama Hindu merupakan salah satu Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa beragama Hindu di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Mata kuliah ini ditempatkan sebagai bagian penting dari kurikulum untuk mengembangkan dimensi sikap dan nilai keagamaan mahasiswa, di samping penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan akademik. Secara umum, mata kuliah ini diberikan pada semester awal agar dapat meletakkan dasar pemahaman dan penghayatan keagamaan sejak awal masa studi. Beban belajar dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai ketentuan kurikulum universitas, dan berkontribusi terhadap pencapaian profil lulusan, terutama pada ranah sikap, nilai, serta pengetahuan keagamaan umum yang menjadi kewajiban setiap lulusan perguruan tinggi.

3. Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti mata kuliah Pendidikan Agama Hindu, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, serta kepribadian yang baik sesuai nilai-nilai Pancasila; berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air dan

bahasa nasional serta mendukung perdamaian dunia; mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama, serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas (CPL-01) yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

a. Sikap dan nilai (sraddha, bhakti, dan akhlak mulia berdasarkan dharma)

- 1) Menunjukkan peningkatan sraddha (iman) dan bhakti (pengabdian) kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang tercermin dalam kesadaran bersembahyang, disiplin menjalankan ajaran agama, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai dharma.
- 2) Menampilkan perilaku yang selaras dengan ajaran susila Hindu, seperti kejujuran, kesederhanaan, kerja keras, tenggang rasa, dan sikap tidak menyakiti (ahimsa) dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Mengembangkan komitmen pribadi untuk terus menyucikan diri (atma tattwa) dan menjadikan ajaran agama Hindu sebagai pedoman etis dalam mengambil keputusan, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat.

b. Pengetahuan kehinduan dasar

- 1) Memahami konsep-konsep dasar ajaran Hindu, termasuk hakikat Tuhan (Brahman/Ida Sang Hyang Widhi Wasa), jiwa (atman), karma phala, punarbhawa (reinkarnasi), dan moksa.
- 2) Menguasai pengetahuan dasar tentang tattwa, susila, dan upacara, serta keterkaitannya dalam kehidupan umat Hindu.
- 3) Mengetahui prinsip-prinsip ajaran Hindu dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keluarga, sosial, budaya, lingkungan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Keterampilan berpikir kritis terhadap isu-isu keagamaan dan sosial kontemporer

- 1) Mampu menganalisis berbagai persoalan moral dan sosial, seperti intoleransi, kekerasan, kerusakan lingkungan, perilaku konsumtif, dan korupsi, dalam perspektif ajaran dharma.
- 2) Mampu membedakan antara ajaran pokok Hindu dengan tradisi atau kebiasaan lokal yang bersifat kultural, sehingga tidak mudah terjebak pada praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai dharma.

- 3) Mampu mengemukakan pendapat secara logis, santun, dan terbuka dalam diskusi mengenai isu keagamaan, budaya, dan kemasyarakatan, serta mendorong dialog yang harmonis di tengah masyarakat majemuk.

4. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi mata kuliah Pendidikan Agama Hindu mencakup pokok-pokok bahasan berikut:

a. Tattwa, susila, dan upacara

- 1) Pengantar tattwa: konsep ketuhanan, hakikat manusia, alam semesta, dan tujuan hidup menurut ajaran Hindu.
- 2) Susila Hindu: nilai-nilai etika dan moral yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam lingkungan.
- 3) Upacara keagamaan Hindu: makna dan fungsi yadnya (dewa yadnya, rsi yadnya, pitra yadnya, manusa yadnya, bhuta yadnya) dalam pembinaan sikap religius, kebersamaan, dan kepedulian sosial.

b. Tri Hita Karana dan kearifan lokal

- 1) Konsep Tri Hita Karana sebagai harmoni antara hubungan manusia dengan Tuhan (parhyangan), sesama manusia (pawongan), dan lingkungan (palemahan).
- 2) Penerapan Tri Hita Karana dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, kampus, dan masyarakat.
- 3) Kearifan lokal dalam tradisi Hindu di Indonesia, khususnya di Bali, dan relevansinya dalam membangun kehidupan yang rukun dan berkelanjutan.

c. Hindu dan kemajemukan

- 1) Pandangan Hindu terhadap pluralitas agama, suku, budaya, dan tradisi di Indonesia.
- 2) Nilai toleransi, ahimsa, dan tat twam asi sebagai dasar hubungan yang harmonis dengan pemeluk agama dan budaya lain.
- 3) Peran umat Hindu dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui sikap moderat, dialogis, dan terbuka terhadap perbedaan.

d. Hindu dan anti korupsi (integritas dan tanggung jawab moral)

- 1) Ajaran Hindu tentang dharma, satya (kejujuran), arjawa (ketulusan), dan tyaga (pengorbanan) sebagai nilai dasar integritas.
- 2) Tinjauan ajaran Hindu terhadap perilaku adharma seperti kecurangan, suap, penyalahgunaan wewenang, dan berbagai bentuk korupsi yang merusak tatanan sosial.

- 3) Upaya internalisasi nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam diri mahasiswa sebagai calon intelektual dan pemimpin, serta contoh tindakan konkret untuk menolak dan mencegah praktik koruptif di lingkungan kampus dan masyarakat.

E. Pendidikan Agama Buddha

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Pendidikan Agama Buddha dirancang untuk membantu mahasiswa beragama Buddha memahami dan menghayati ajaran Buddha secara lebih mendalam, reflektif, dan relevan dengan tantangan kehidupan modern. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajak mempelajari ajaran dasar Buddha (Dhamma) seperti Empat Kebenaran Mulia, Jalan Mulia Berunsur Delapan, Hukum Karma, dan keluhuran sila, serta bagaimana ajaran tersebut dipraktikkan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan kebangsaan. Proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembinaan sikap batin, pengendalian diri, dan pengembangan welas asih (karuna) serta kebijaksanaan (panna). Dengan demikian, Pendidikan Agama Buddha diharapkan menjadi landasan spiritual dan moral yang menuntun mahasiswa menjadi pribadi yang tenang, jujur, penuh kepedulian, dan mampu bertindak bijaksana di tengah dinamika masyarakat majemuk.

2. Kedudukan dalam Kurikulum dan SKS

Pendidikan Agama Buddha merupakan salah satu Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) yang wajib diikuti oleh mahasiswa beragama Buddha di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Mata kuliah ini menempati posisi penting dalam kurikulum karena berkontribusi pada pengembangan dimensi sikap, nilai, dan pengetahuan keagamaan mahasiswa, di samping pengembangan kemampuan akademik dan profesional dalam bidang studinya masing-masing. Umumnya, mata kuliah ini ditempatkan pada semester awal sebagai fondasi pembinaan moral dan spiritual. Beban belajar dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai ketentuan kurikulum universitas dan diperhitungkan dalam pencapaian capaian pembelajaran lulusan, khususnya pada ranah sikap, nilai, dan pengetahuan umum yang diwajibkan bagi setiap lulusan perguruan tinggi.

3. Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti mata kuliah Pendidikan Agama Buddha, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, serta kepribadian yang baik sesuai nilai-nilai Pancasila; berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air dan

bahasa nasional serta mendukung perdamaian dunia; mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama, serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas (CPL-01) yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

a. Sikap dan nilai (keyakinan, sila, dan akhlak mulia)

- 1) Mengembangkan keyakinan (saddha) yang kokoh terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang tercermin dalam keteraturan berlatih, menghormati ajaran, dan berusaha mengurangi sifat-sifat negatif dalam diri.
- 2) Menunjukkan perilaku yang selaras dengan sila (tata moral Buddhis), seperti tidak menyakiti makhluk hidup, tidak mengambil yang tidak diberikan, jujur dalam perkataan, menjauhi perilaku asusila, serta menjaga kejernihan batin.
- 3) Menghayati nilai-nilai welas asih (karuna), cinta kasih (metta), simpati (mudita), dan keseimbangan batin (upekkha) dalam hubungan dengan orang lain, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat luas.

b. Pengetahuan keagamaan Buddha dasar

- 1) Memahami ajaran dasar Buddha, termasuk Empat Kebenaran Mulia, Jalan Mulia Berunsur Delapan, Hukum Karma dan Kelahiran Kembali, serta tiga corak universal (anicca, dukkha, anatta).
- 2) Menguasai pengetahuan dasar tentang Tri Ratna (Buddha, Dhamma, Sangha), lima sila, dan prinsip-prinsip hidup Buddhis yang membawa pada kebahagiaan dan pembebasan dari penderitaan.
- 3) Mengetahui bagaimana ajaran Buddha memberikan pedoman dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan, seperti pengelolaan emosi, relasi sosial, pekerjaan, dan tanggung jawab sebagai warga negara.

c. Keterampilan berpikir kritis terhadap isu-isu keagamaan dan sosial kontemporer

- 1) Mampu menganalisis berbagai persoalan moral dan sosial, seperti kekerasan, intoleransi, penyalahgunaan kekuasaan, kerusakan lingkungan, dan gaya hidup konsumtif, dalam perspektif ajaran Buddha.
- 2) Mampu menggunakan prinsip-prinsip Dhamma, seperti jalan tengah (majjhima patipada) dan usaha benar (samma vayama), untuk menilai dan merespons isu-isu kontemporer secara bijaksana dan seimbang.

- 3) Mampu menyampaikan pandangan secara argumentatif, tenang, dan penuh rasa hormat dalam diskusi tentang isu keagamaan, etika, dan kemasyarakatan, serta mendukung terciptanya dialog yang damai di tengah keragaman.

4. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi mata kuliah Pendidikan Agama Buddha mencakup pokok-pokok bahasan berikut:

a. Ajaran dasar Buddha (Dhamma)

- 1) Empat Kebenaran Mulia dan Jalan Mulia Berunsur Delapan sebagai inti ajaran Buddha.
- 2) Hukum sebab-akibat (karma) dan kelahiran kembali, serta implikasinya terhadap tanggung jawab pribadi.
- 3) Tiga racun batin (keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin) serta jalan mengatasinya melalui latihan sila, samadhi, dan panna.

b. Etika Buddhis dalam kehidupan modern

- 1) Lima sila sebagai dasar perilaku bermoral dan delapan sila/aturan lain yang relevan dengan pembinaan diri.
- 2) Penerapan etika Buddhis dalam kehidupan sehari-hari: di keluarga, kampus, dunia kerja, serta dalam penggunaan media digital dan teknologi.
- 3) Pentingnya pengendalian diri, kejujuran, kesederhanaan, dan kepedulian sosial sebagai manifestasi praktik Dhamma dalam kehidupan modern.

c. Buddhisme dan masyarakat majemuk

- 1) Pandangan Buddha tentang persaudaraan universal, kesetaraan, dan penghormatan terhadap semua makhluk hidup.
- 2) Sikap Buddhis terhadap keberagaman agama, budaya, dan pandangan hidup di Indonesia, serta pentingnya toleransi, dialog, dan kerja sama lintas iman.
- 3) Peran umat Buddha dalam memelihara kerukunan, mencegah kekerasan, dan membangun budaya damai di tengah masyarakat yang plural.

d. Kedisiplinan, kejujuran, dan anti korupsi

- 1) Ajaran Buddha tentang kejujuran, tanggung jawab, dan menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain sebagai bentuk pelaksanaan sila dan praktik Dhamma.
- 2) Tinjauan ajaran Buddha terhadap korupsi, kecurangan, dan penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk keserakahan dan ketidaktahuan yang menimbulkan penderitaan luas.

- 3) Upaya internalisasi nilai-nilai integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam diri mahasiswa sebagai calon intelektual dan pemimpin, serta contoh langkah konkret untuk menolak dan mencegah praktik koruptif di lingkungan kampus dan masyarakat.

F. Pendidikan Pancasila

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Pendidikan Pancasila dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang mendalam, kritis, dan reflektif mengenai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajak menelusuri sejarah perumusan Pancasila, menggali nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, serta mengkaji relevansinya terhadap berbagai persoalan kebangsaan dan kemanusiaan kontemporer. Proses pembelajaran tidak berhenti pada penguasaan konsep normatif, tetapi menekankan internalisasi nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku sehari-hari, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, toleransi, gotong-royong, keadilan sosial, dan ketaatan pada hukum. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila diharapkan menjadi wahana strategis untuk membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang cerdas, kritis, berkarakter, dan memiliki komitmen kuat terhadap kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kedudukan dalam Kurikulum dan SKS

Pendidikan Pancasila merupakan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, tanpa memandang program studi maupun bidang keilmuan. Kedudukannya bersifat fundamental karena secara langsung berkontribusi pada pengembangan wawasan kebangsaan, kesadaran konstitusional, dan karakter kebangsaan mahasiswa. Mata kuliah ini umumnya ditempatkan pada semester awal agar nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan bagi proses pembelajaran dan aktivitas akademik selanjutnya. Beban belajar dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai ketentuan kurikulum, dan merupakan bagian penting dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada ranah sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan generik sebagai warga negara Indonesia.

3. Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti mata kuliah Pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, serta kepribadian yang baik sesuai nilai-nilai

Pancasila; berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air dan bahasa nasional serta mendukung perdamaian dunia; mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama, serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas (CPL-01) yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

a. Sikap dan nilai (jati diri kebangsaan dan karakter Pancasila)

- 1) Menunjukkan sikap cinta tanah air, bangga menjadi bangsa Indonesia, dan bersedia berkontribusi bagi kemajuan bangsa sesuai kapasitas dan bidang keilmuannya.
- 2) Menghargai perbedaan agama, suku, budaya, dan pandangan politik, serta mengedepankan dialog, musyawarah, dan semangat persatuan dalam menyikapi perbedaan tersebut.
- 3) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, gotong royong, dan tanggung jawab sebagai perwujudan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

b. Pengetahuan tentang Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup

- 1) Memahami sejarah lahirnya Pancasila, proses perumusan dan pengesahannya, serta kedudukannya dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia.
- 2) Menguasai makna dan substansi nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, serta keterkaitannya dengan HAM, demokrasi, dan keadilan sosial.
- 3) Mengetahui bagaimana Pancasila berfungsi sebagai sumber etika politik, hukum, dan kebijakan publik di Indonesia, serta sebagai dasar dalam menyikapi berbagai tantangan globalisasi.

c. Keterampilan berpikir kritis terhadap persoalan kebangsaan dan kenegaraan

- 1) Mampu menganalisis berbagai persoalan kebangsaan, seperti disintegrasi, radikalisme, intoleransi, ketimpangan sosial, dan korupsi dengan menggunakan perspektif nilai-nilai Pancasila.
- 2) Mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan terhadap nilai Pancasila dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, serta merumuskan alternatif sikap dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- 3) Mampu mengemukakan pendapat secara logis, argumentatif, dan santun dalam diskusi mengenai isu-isu kebangsaan dan kenegaraan, baik di lingkungan akademik maupun ruang publik.

4. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi mata kuliah Pendidikan Pancasila mencakup pokok-pokok bahasan berikut:

a. Sejarah dan kedudukan Pancasila

- 1) Latar historis perumusan Pancasila: dinamika sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, serta konteks sosial-politik kelahiran Pancasila.
- 2) Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan sumber dari segala sumber hukum negara.
- 3) Perkembangan pemikiran dan penafsiran Pancasila dalam lintasan sejarah ketatanegaraan Indonesia.

b. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

- 1) Penghayatan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan beragama yang toleran dan menjunjung kebebasan beribadah.
- 2) Perwujudan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia.
- 3) Implementasi sila Persatuan Indonesia dalam upaya memperkuat integrasi nasional di tengah kemajemukan.
- 4) Praktik sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam sistem demokrasi Indonesia.
- 5) Pengamalan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam kebijakan pembangunan dan kehidupan ekonomi yang berkeadilan.

c. Pancasila, konstitusi, demokrasi, dan HAM

- 1) Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan.
- 2) Pancasila sebagai landasan demokrasi Pancasila yang menjunjung musyawarah, partisipasi warga negara, dan penghormatan terhadap perbedaan.
- 3) Pancasila dan jaminan hak asasi manusia: keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, serta tanggung jawab negara.

d. Pancasila dan penguatan karakter serta anti korupsi

- 1) Pancasila sebagai sumber nilai untuk membangun karakter bangsa yang jujur, disiplin, bekerja keras, peduli sosial, dan taat aturan.
- 2) Tinjauan nilai-nilai Pancasila terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai bentuk pengkhianatan terhadap keadilan sosial dan kedaulatan rakyat.

- 3) Strategi penguatan budaya antikorupsi di lingkungan perguruan tinggi melalui teladan, regulasi internal, dan pembiasaan sikap-sikap Pancasila dalam kehidupan kampus.

G. Pendidikan Kewarganegaraan

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajak mengkaji dasar-dasar konstitusional negara, sistem politik dan pemerintahan, hak asasi manusia, serta praktik demokrasi di Indonesia. Pembelajaran tidak hanya diarahkan pada penguasaan aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi, kecintaan pada tanah air, serta komitmen untuk turut serta menjaga persatuan, menegakkan hukum, dan memperjuangkan keadilan sosial.

2. Kedudukan dalam Kurikulum dan SKS

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, terlepas dari program studi dan bidang keilmuan. Kedudukan mata kuliah ini sangat strategis karena berkontribusi langsung pada pembentukan warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, serta memahami sistem ketatanegaraan dan kehidupan demokrasi Indonesia. Umumnya, mata kuliah ini ditempatkan pada semester awal agar dapat memperkuat landasan pemahaman mahasiswa tentang negara, konstitusi, dan kewarganegaraan sejak dini. Beban belajar dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai ketentuan kurikulum, dan menjadi bagian penting dari pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada ranah sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan generik sebagai warga negara.

3. Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, serta kepribadian yang baik sesuai nilai-nilai Pancasila; berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air dan bahasa nasional serta mendukung perdamaian dunia; mampu bekerja sama dan memiliki

kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama, serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas (CPL-01) yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

a. Sikap dan nilai (kecintaan tanah air, tanggung jawab kewarganegaraan)

- 1) Menunjukkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air, serta kesediaan untuk menjaga keutuhan NKRI dan menghormati simbol-simbol negara.
- 2) Mengembangkan sikap taat hukum, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nilai demokrasi, dan mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok sempit.
- 3) Menampilkan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, antara lain melalui partisipasi sosial, kepedulian terhadap lingkungan, dan keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan.

b. Pengetahuan tentang konstitusi, sistem ketatanegaraan, dan kewarganegaraan

- 1) Memahami kedudukan, fungsi, dan isi pokok Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan negara.
- 2) Menguasai pengetahuan tentang lembaga-lembaga negara, sistem pemerintahan, sistem pemilu, serta mekanisme kerja lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- 3) Mengetahui konsep kewarganegaraan Indonesia, termasuk hak dan kewajiban warga negara, hubungan warga negara dengan negara, serta posisi Indonesia dalam pergaulan regional dan global.

c. Keterampilan berpikir kritis dan partisipatif terhadap isu-isu kewarganegaraan

- 1) Mampu menganalisis berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan, seperti pelanggaran HAM, korupsi, konflik sosial, radikalisme, disintegrasi, serta masalah ketimpangan sosial dan ekonomi.
- 2) Mampu menilai kebijakan publik dan praktik penyelenggaraan negara secara kritis dan objektif dengan menggunakan prinsip-prinsip konstitusi, demokrasi, dan negara hukum.
- 3) Mampu mengemukakan pendapat secara logis, argumentatif, dan santun dalam diskusi mengenai isu-isu kewarganegaraan, serta terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat luas.

4. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mencakup pokok-pokok bahasan berikut:

a. Konstitusi, negara hukum, dan sistem ketatanegaraan Indonesia

- 1) Konsep dasar negara, konstitusi, dan negara hukum (rechtsstaat) dalam perspektif teori dan praktik di Indonesia.
- 2) Sejarah dan dinamika perubahan UUD NRI Tahun 1945 serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan.
- 3) Struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga, serta mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi konstitusional.

b. Kewarganegaraan, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

- 1) Pengertian dan ruang lingkup kewarganegaraan: status, identitas, hak, dan kewajiban warga negara.
- 2) Prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi politik, dan budaya demokrasi dalam konteks Indonesia.
- 3) Konsep HAM, jaminan HAM dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta tantangan pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia.

c. Warga negara dalam konteks global dan era digital

- 1) Posisi Indonesia dalam sistem internasional, kerja sama regional dan global, serta tantangan yang muncul akibat globalisasi.
- 2) Peran warga negara dalam menghadapi isu-isu global, seperti perubahan iklim, migrasi, terorisme, dan kejahatan lintas negara.
- 3) Tanggung jawab warga negara di era digital, termasuk etika bermedia sosial, literasi digital, dan pencegahan penyebaran hoaks serta ujaran kebencian.

d. Partisipasi politik, etika publik, dan anti korupsi

- 1) Bentuk-bentuk partisipasi politik warga negara, mulai dari pemilu, organisasi kemasyarakatan, hingga keterlibatan dalam advokasi kebijakan publik.
- 2) Etika publik dalam penyelenggaraan negara: integritas, profesionalitas, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang merusak demokrasi dan keadilan sosial, serta strategi penguatan budaya antikorupsi di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa, melalui pendidikan, keteladanan, dan penguatan sistem.

H. Bahasa Indonesia

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Bahasa Indonesia bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan efektif dalam konteks akademik maupun profesional. Fokus utama pembelajaran adalah penguasaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, media komunikasi ilmiah, serta sarana pembentukan cara berpikir logis, kritis, dan sistematis. Mahasiswa diajak untuk terampil menulis karya ilmiah, menyusun laporan, menyajikan presentasi, serta berkomunikasi lisan dan tulisan secara santun dan bertanggung jawab. Pembelajaran juga menekankan aspek etika berbahasa dan kejujuran akademik, sehingga Bahasa Indonesia tidak hanya dipahami sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan budaya literasi dan integritas ilmiah.

2. Kedudukan dalam Kurikulum dan SKS

Bahasa Indonesia merupakan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Mata kuliah ini memegang peran strategis dalam mendukung keberhasilan studi mahasiswa, karena hampir seluruh aktivitas akademik—mulai dari membaca literatur, menulis tugas, menyusun laporan penelitian, hingga mempresentasikan gagasan—menggunakan bahasa Indonesia sebagai media utama. Mata kuliah ini biasanya diberikan pada semester awal agar mampu membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar berbahasa akademik sejak dini. Beban belajar dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai ketentuan kurikulum, dan berkontribusi secara langsung terhadap capaian pembelajaran lulusan pada ranah pengetahuan umum, keterampilan komunikasi, dan sikap ilmiah.

3. Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, serta kepribadian yang baik sesuai nilai-nilai Pancasila; berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air dan bahasa nasional serta mendukung perdamaian dunia; mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama, serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas (CPL-01) yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

a. Sikap dan nilai (santun berbahasa dan integritas ilmiah)

- 1) Menunjukkan sikap santun, objektif, dan bertanggung jawab dalam berkomunikasi lisan maupun tulisan.
- 2) Menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa persatuan, dan bahasa ilmu pengetahuan.
- 3) Menjunjung tinggi integritas ilmiah dengan menghindari plagiarisme dan menghargai karya orang lain melalui pencantuman sumber yang tepat.

b. Pengetahuan tentang kaidah dan ragam bahasa Indonesia akademik

- 1) Memahami kaidah dasar ejaan, tata bahasa, dan diksi yang baku dalam bahasa Indonesia.
- 2) Mengetahui ciri-ciri ragam bahasa ilmiah, termasuk keteraturan struktur kalimat, kejelasan alur pikir, dan ketepatan istilah.
- 3) Memahami prinsip-prinsip penyusunan karya ilmiah, seperti makalah, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan tugas akhir.

c. Keterampilan berbahasa dalam konteks akademik

- 1) Mampu menulis teks akademik (makalah, laporan, esai ilmiah) dengan struktur yang runtut, logis, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia baku.
- 2) Mampu menyusun kutipan, parafrase, dan daftar pustaka dengan benar berdasarkan standar penulisan ilmiah yang berlaku.
- 3) Mampu menyajikan gagasan secara lisan melalui presentasi yang sistematis, jelas, dan komunikatif dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

4. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi mata kuliah Bahasa Indonesia mencakup pokok-pokok bahasan berikut:

a. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia

- 1) Sejarah singkat perkembangan bahasa Indonesia dan kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara.
- 2) Fungsi bahasa Indonesia dalam pendidikan, pemerintahan, dunia ilmu pengetahuan, dan kehidupan sosial budaya.

b. Kaidah bahasa Indonesia baku

- 1) Ejaan yang disempurnakan/terbaru (Ejaan Bahasa Indonesia): penulisan huruf, kata, tanda baca, dan unsur serapan.

- 2) Tata bahasa baku: struktur kalimat, frasa, klausa, paragraf, serta pemilihan diksi yang tepat dan efektif.

c. Bahasa Indonesia dalam penulisan ilmiah

- 1) Ciri-ciri bahasa ilmiah: lugas, objektif, runtut, dan konsisten.
- 2) Struktur penulisan karya ilmiah: judul, abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka.
- 3) Teknik mengutip, memparafrase, dan menyusun daftar pustaka sesuai gaya selingkung yang ditetapkan perguruan tinggi.

d. Retorika, presentasi, dan etika berbahasa

- 1) Teknik menyusun argumen secara logis dan sistematis dalam tulisan maupun presentasi lisan.
- 2) Keterampilan presentasi akademik: penyusunan bahan tayang, penguasaan materi, dan cara penyampaian yang baik.
- 3) Etika berbahasa di ruang publik dan media digital, termasuk penggunaan bahasa yang santun, anti ujaran kebencian, dan bebas hoaks, sebagai bagian dari tanggung jawab akademik dan kewargaan.

I. Pendidikan Anti Korupsi

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi disusun untuk menumbuhkan kesadaran kritis, sikap menolak, dan kemampuan bertindak mahasiswa dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di berbagai lini kehidupan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajak memahami pengertian, bentuk, faktor penyebab, dan dampak korupsi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menelaah kerangka hukum dan kebijakan publik terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Pembelajaran tidak hanya menekankan pemahaman teoritis, tetapi diarahkan pada internalisasi nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Dengan demikian, Pendidikan Anti Korupsi diharapkan menjadi wahana pembinaan karakter dan moralitas publik mahasiswa, agar kelak mampu menjadi agen perubahan yang berkomitmen mewujudkan tata kelola yang bersih dan berkeadilan.

2. Kedudukan dalam Kurikulum dan SKS

Pendidikan Anti Korupsi merupakan Mata Kuliah Penciri Universitas (MKPU) Universitas yang mencerminkan komitmen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia untuk

berperan aktif dalam gerakan nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mata kuliah ini bersifat lintas disiplin dan relevan bagi seluruh program studi, karena persoalan korupsi menyentuh hampir semua bidang kehidupan: politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Mata kuliah biasanya ditempatkan pada semester awal atau menengah untuk menguatkan karakter dan integritas mahasiswa selama menjalani proses pendidikan tinggi. Beban belajar dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai ketentuan kurikulum, dan mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan, khususnya pada aspek sikap, nilai, dan tanggung jawab sosial.

3. Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, serta kepribadian yang baik sesuai nilai-nilai Pancasila; berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air dan bahasa nasional serta mendukung perdamaian dunia; mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama, serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas (CPL-01). Mahasiswa juga harus mampu menerapkan nilai-nilai ke-PGRI-an dan falsafah Tri Hita Karana (nilai kearifan lokal masyarakat Hindu Bali) dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di kampus maupun di masyarakat dan di dudika (dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja) (CPL-03). Selanjutnya CPL-01 dan CPL-03 dijabarkan sebagai berikut:

a. Sikap dan nilai (integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial)

- 1) Menunjukkan sikap tegas menolak segala bentuk korupsi, kecurangan, dan penyalahgunaan wewenang, baik dalam skala kecil maupun besar.
- 2) Mengembangkan integritas pribadi yang tercermin dalam kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan konsistensi antara ucapan dan tindakan.
- 3) Menumbuhkan kepedulian terhadap kepentingan umum dan keadilan sosial, serta kesediaan untuk berkontribusi dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kampus dan masyarakat.

b. Pengetahuan tentang korupsi dan kerangka hukum pemberantasannya

- 1) Memahami pengertian korupsi, berbagai bentuk dan modus operandi korupsi, serta faktor-faktor penyebabnya dari perspektif individu, struktural, dan kultural.
- 2) Mengetahui dampak korupsi terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan moral bangsa.
- 3) Menguasai pengetahuan dasar tentang peraturan perundang-undangan dan lembaga yang berwenang dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

c. Keterampilan analitis dan preventif terhadap praktik koruptif

- 1) Mampu mengidentifikasi potensi dan risiko korupsi dalam berbagai situasi, termasuk dalam lingkungan pendidikan tinggi, dunia kerja, dan pelayanan publik.
- 2) Mampu menganalisis kasus-kasus korupsi secara kritis untuk memahami akar masalah, pola, dan dampaknya, serta merumuskan alternatif solusi.
- 3) Mampu merancang dan mengusulkan langkah-langkah sederhana namun konkret dalam membangun budaya integritas dan sistem pencegahan korupsi di lingkungan kampus dan komunitasnya.

4. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi mencakup pokok-pokok bahasan berikut:

a. Konsep dasar korupsi dan dampaknya

- 1) Pengertian, karakteristik, bentuk, dan klasifikasi korupsi dalam berbagai sektor.
- 2) Faktor penyebab korupsi dari sisi individu (moral, karakter, gaya hidup), struktural (sistem dan kelembagaan), dan kultural (nilai dan kebiasaan masyarakat).
- 3) Dampak korupsi terhadap pembangunan, keadilan sosial, kepercayaan publik, dan martabat bangsa.

b. Kerangka hukum dan kelembagaan anti korupsi

- 1) Tinjauan umum peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia.
- 2) Peran lembaga-lembaga negara, penegak hukum, dan lembaga independen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- 3) Pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mencegah korupsi.

c. Budaya integritas dan etika publik

- 1) Nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, dan kepedulian sebagai fondasi karakter antikorupsi.

- 2) Etika publik dan profesionalisme dalam dunia kerja, termasuk konflik kepentingan, gratifikasi, dan penyalahgunaan sumber daya.
- 3) Peran pendidikan, keluarga, media, dan komunitas dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.

d. Pendidikan anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi

- 1) Potensi bentuk-bentuk kecurangan dan perilaku menyimpang di lingkungan kampus, seperti plagiarisme, manipulasi nilai, pungutan liar, dan penyalahgunaan fasilitas.
- 2) Strategi penguatan integritas akademik melalui kebijakan, sistem pengawasan, dan pembiasaan perilaku jujur dalam proses belajar-mengajar.
- 3) Rancangan aksi atau proyek kecil (project-based learning) yang melibatkan mahasiswa dalam kampanye, sosialisasi, atau inisiatif konkret pencegahan korupsi di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar.

J. Kewirausahaan

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah **Kewirausahaan** dirancang untuk menumbuhkan pola pikir (*mindset*), sikap, dan keterampilan kewirausahaan pada mahasiswa, baik sebagai calon wirausahawan mandiri maupun sebagai profesional yang memiliki jiwa inovatif dan berorientasi pada pemecahan masalah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajak memahami konsep dasar kewirausahaan, menggali potensi diri, mengembangkan kreativitas dan inovasi, serta menyusun gagasan usaha yang realistis dan bertanggung jawab. Pembelajaran menekankan pentingnya integritas, kerja keras, keberanian mengambil risiko yang terukur, kemampuan membaca peluang, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Kewirausahaan dipandang bukan hanya sebagai upaya mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana menciptakan nilai tambah sosial (*social value*) yang selaras dengan etika, nilai Pancasila, dan prinsip anti korupsi.

2. Kedudukan dalam Kurikulum dan SKS

Mata kuliah Kewirausahaan merupakan Mata Kuliah Penciri Universitas yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, tanpa membedakan program studi. Mata kuliah ini menempati posisi strategis dalam kurikulum karena berkontribusi pada pembentukan lulusan yang mandiri, kreatif, adaptif, dan mampu menciptakan lapangan kerja, bukan hanya mencari pekerjaan. Secara umum, Kewirausahaan diberikan pada semester menengah, saat mahasiswa telah memiliki dasar pengetahuan bidang

ilmunya sehingga dapat mengintegrasikan ilmu tersebut ke dalam gagasan usaha. Beban belajar dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai ketentuan kurikulum universitas, dan capaian pembelajarannya dihubungkan dengan profil lulusan yang berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing, baik di tingkat lokal maupun global.

3. Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti mata kuliah Kewirahusahaan, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan keterampilan abad 21 yang menumbuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*high order thinking skills, HOTS*), yang meliputi komunikasi (*Communication*), kolaborasi (*Collaboration*), berpikir kritis (*Critical thinking*), berpikir kreatif (*Creative thinking*), logika komputasional (*Computational logic*), empati (*Compassion*), dan tanggung jawab kewarganegaraan (*Civic responsibility*), dan kemampuan yang diperlukan dalam era revolusi industri 4.0 menuju masyarakat 5.0 (literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia), serta penguasaan bahasa Inggris untuk mendukung kemampuan yang bersifat global yang dibutuhkan dalam dunia (dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja) dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi (CPL-02), yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

a. Sikap dan nilai kewirausahaan

- 1) Menunjukkan sikap mandiri, percaya diri, ulet, dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan.
- 2) Memiliki orientasi pada prestasi, keberanian mengambil risiko yang terukur, serta kemauan untuk terus belajar dari kegagalan.
- 3) Menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, anti korupsi, serta kepekaan sosial dalam merancang dan mengembangkan usaha.

b. Pengetahuan dasar kewirausahaan

- 1) Memahami konsep kewirausahaan, karakteristik wirausahawan sukses, serta peran kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi dan sosial.
- 2) Mengetahui tahapan proses kewirausahaan, mulai dari identifikasi peluang, perumusan ide usaha, analisis kelayakan, hingga perencanaan bisnis.
- 3) Memahami aspek dasar manajemen usaha, termasuk pemasaran, produksi/operasi, keuangan sederhana, dan pengelolaan sumber daya manusia.
- 4) Mengetahui dasar-dasar regulasi, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan usaha.

c. Keterampilan kewirausahaan (berpikir kreatif dan perencanaan usaha)

- 1) Mampu mengidentifikasi peluang usaha berdasarkan pengamatan terhadap kebutuhan dan permasalahan di lingkungan sekitar.
- 2) Mampu mengembangkan ide usaha kreatif dan inovatif yang relevan dengan bidang ilmu atau minat mahasiswa.
- 3) Mampu menyusun rencana usaha (business plan) sederhana yang mencakup aspek analisis pasar, model bisnis, strategi pemasaran, perencanaan keuangan dasar, dan manajemen risiko.
- 4) Mampu mempresentasikan gagasan usaha secara meyakinkan, baik lisan maupun tertulis, serta mampu bekerja sama dalam tim kewirausahaan.

4. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi mata kuliah Kewirausahaan mencakup, namun tidak terbatas pada, pokok-pokok bahasan berikut:

a. Konsep dasar dan karakter kewirausahaan

- 1) Pengertian dan ruang lingkup kewirausahaan.
- 2) Peran dan kontribusi kewirausahaan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi.
- 3) Karakteristik wirausahawan: kreatif, inovatif, berani mengambil risiko, mandiri, dan berorientasi pada prestasi.
- 4) Jiwa wirausaha dalam berbagai profesi (intrapreneurship) dan relevansinya bagi lulusan perguruan tinggi.

b. Kreativitas, inovasi, dan identifikasi peluang usaha

- 1) Konsep kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan.
- 2) Teknik menggali ide usaha (brainstorming, observasi pasar, analisis tren, pemetaan masalah).
- 3) Identifikasi peluang usaha berbasis potensi lokal, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
- 4) Analisis sederhana terhadap kelayakan peluang usaha: pasar, pesaing, dan keunggulan kompetitif.

c. Perencanaan dan pengembangan usaha (business planning)

- 1) Komponen utama rencana usaha (business plan): profil usaha, produk/jasa, analisis pasar, strategi pemasaran, aspek operasional, dan aspek keuangan dasar.
- 2) Pengantar model bisnis (business model) dan konsep nilai tambah (value proposition).
- 3) Perencanaan sumber daya: modal, tenaga kerja, jaringan pemasok, dan mitra usaha.

- 4) Pengelolaan risiko usaha dan strategi antisipasi sederhana.

d. Manajemen usaha kecil dan pemula

- 1) Pengantar manajemen pemasaran untuk usaha kecil: segmentasi, target pasar, positioning, dan bauran pemasaran.
- 2) Pengelolaan keuangan sederhana: pencatatan arus kas, perhitungan biaya dan harga jual, serta proyeksi laba rugi.
- 3) Pengelolaan operasional dan kualitas layanan/produk pada usaha skala kecil.
- 4) Pengembangan jaringan (networking) dan kerja sama dengan pihak lain (komunitas, lembaga pemerintah/swasta, inkubator bisnis).

e. Aspek hukum, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial

- 1) Gambaran umum perizinan usaha, bentuk badan usaha, dan kewajiban dasar pelaku usaha.
- 2) Etika bisnis: kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab kepada konsumen, karyawan, dan masyarakat.
- 3) Integrasi nilai anti korupsi dalam aktivitas usaha: menolak suap, manipulasi laporan, dan praktik bisnis tidak etis.
- 4) Kewirausahaan sosial (social entrepreneurship) dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

f. Kewirausahaan digital dan presentasi rencana usaha

- 1) Peluang kewirausahaan di era digital: bisnis berbasis platform, marketplace, dan media sosial.
- 2) Pemasaran digital dasar (digital marketing): pemanfaatan media sosial, konten kreatif, dan komunikasi daring dengan pelanggan.

Penyusunan dan penyajian rencana usaha (business plan pitch) di hadapan dosen dan/atau praktisi sebagai latihan awal memasuki dunia usaha.

K. Literasi Digital

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Literasi Digital merupakan Mata Kuliah Penciri Universitas yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan literasi abad ke-21 berbasis *Outcomes-Based Education* (OBE). Mata kuliah ini menekankan pengembangan *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) yang mencakup kemampuan komunikasi (communication), kolaborasi (*collaboration*), berpikir kritis (*critical thinking*), berpikir kreatif (*creative*

thinking), logika komputasional (*computational logic*), empati (*compassion*), dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic responsibility*). Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk mampu menggunakan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan konten digital secara etis, kritis, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan dimensi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia sebagai fondasi masyarakat 5.0. Selain itu, mata kuliah ini mengintegrasikan penguasaan bahasa Inggris fungsional dan akademik sebagai sarana komunikasi global untuk mendukung kesiapan mahasiswa memasuki DUDIKA dan/atau melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi..

2. Kedudukan dalam Kurikulum dan SKS

Mata Kuliah Literasi Digital berkedudukan sebagai Mata Kuliah Penciri Universitas yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa lintas program studi. Mata kuliah ini berfungsi sebagai fondasi kompetensi generik institusi yang mendukung ketercapaian CPL Institusi, khususnya pada aspek keterampilan abad ke-21, karakter kebangsaan, dan kesiapan global. Beban studi mata kuliah ini adalah 2 (dua) SKS, dilaksanakan pada semester awal agar menjadi dasar pengembangan kompetensi mahasiswa dalam pembelajaran berbasis digital, kolaboratif, dan transdisipliner pada mata kuliah selanjutnya, termasuk implementasi MBKM.

3. Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti mata kuliah Wawasan PGRI, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan keterampilan abad 21 yang menumbuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*high order thinking skills, HOTS*), yang meliputi komunikasi (*Communication*), kolaborasi (*Collaboration*), berpikir kritis (*Critical thinking*), berpikir kreatif (*Creative thinking*), logika komputasional (*Computational logic*), empati (*Compassion*), dan tanggung jawab kewarganegaraan (*Civic responsibility*), dan kemampuan yang diperlukan dalam era revolusi industri 4.0 menuju masyarakat 5.0 (literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia), serta penguasaan bahasa Inggris untuk mendukung kemampuan yang bersifat global yang dibutuhkan dalam dudi (dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja) dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi (CPL-02), yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

- 1) **Menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS)** dalam mengakses, mengolah, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dan data digital secara kritis dan bertanggung jawab.
- 2) **Mengomunikasikan gagasan dan hasil analisis** secara efektif, kolaboratif, dan etis melalui berbagai media digital, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

- 3) **Berkolaborasi dalam tim multidisipliner** untuk memecahkan permasalahan nyata berbasis teknologi digital dengan mengedepankan empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial.
- 4) **Menerapkan logika komputasional** dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penyusunan solusi inovatif berbasis data dan teknologi.
- 5) **Menunjukkan sikap empati, etika digital, dan tanggung jawab kewarganegaraan**, termasuk kesadaran hukum, keamanan digital, perlindungan data pribadi, dan nilai kebangsaan.
- 6) **Mengintegrasikan literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia** sebagai bekal adaptif dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0, baik untuk dunia kerja maupun studi lanjut.

4. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi mata kuliah Kewirausahaan mencakup, namun tidak terbatas pada, pokok-pokok bahasan berikut:

- 1) **Konsep Dasar Literasi Digital**
 - a) Literasi digital dalam konteks OBE, SN-Dikti, dan Masyarakat 5.0
 - b) Tantangan dan peluang Revolusi Industri 4.0
- 2) **Literasi Data**
 - a) Akses, validasi, dan analisis data digital
 - b) Pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan
 - c) Etika dan keamanan data
- 3) **Literasi Teknologi**
 - a) Teknologi digital dan platform pembelajaran
 - b) Dasar logika komputasional dan pemikiran algoritmik
 - c) Pemanfaatan AI dan teknologi digital secara bertanggung jawab
- 4) **Literasi Manusia**
 - a) Empati, komunikasi, dan kolaborasi digital
 - b) Kreativitas dan inovasi dalam ekosistem digital
 - c) Kepemimpinan dan kerja tim virtual
- 5) **Berpikir Kritis dan Kreatif (HOTS)**
 - a) Critical dan creative thinking dalam konteks digital
 - b) Problem solving berbasis kasus nyata DUDIKA

6) **Etika Digital dan Tanggung Jawab Kewarganegaraan**

- a) Etika bermedia digital, hak cipta, dan plagiarisme
- b) Keamanan siber, hoaks, dan literasi informasi
- c) Civic responsibility dan karakter kebangsaan di ruang digital

7) **Penguatan Bahasa Inggris untuk Kompetensi Global**

- a) Bahasa Inggris fungsional dan akademik berbasis konteks digital
- b) Presentasi, kolaborasi, dan komunikasi global

L. Wawasan PGRI

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah **Wawasan PGRI** merupakan mata kuliah penciri Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang dirancang untuk menanamkan pemahaman, kebanggaan, dan komitmen terhadap jati diri PGRI sebagai organisasi perjuangan, profesi, dan ketenagakerjaan di bidang pendidikan, sekaligus penguatan identitas kelembagaan universitas sebagai bagian dari keluarga besar PGRI. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajak mengenal sejarah, nilai dasar, visi perjuangan, dan peran strategis PGRI dalam pembangunan pendidikan nasional, serta posisi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai institusi yang melanjutkan spirit pengabdian dan pembinaan guru serta tenaga kependidikan.

Pembelajaran Wawasan PGRI tidak hanya berorientasi pada pengetahuan historis dan kelembagaan, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai luhur seperti pengabdian, keteladanan, kepedulian sosial, nasionalisme, dan profesionalisme. Mata kuliah ini diharapkan mampu membentuk sikap mahasiswa sebagai calon intelektual dan/atau pendidik yang menyadari tanggung jawab moral dan sosialnya, setia pada nilai perjuangan PGRI, serta memiliki komitmen untuk turut memajukan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Kedudukan dalam Kurikulum dan SKS

Mata kuliah Wawasan PGRI merupakan Mata Kuliah Penciri Universitas (MKPU) yang **wajib** diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, tanpa memandang program studi dan bidang ilmu. Mata kuliah ini menjadi salah satu identitas kurikulum yang membedakan universitas berbasis PGRI dengan perguruan tinggi lainnya, karena secara eksplisit mengangkat sejarah, nilai, dan spirit perjuangan guru serta organisasi PGRI.

Secara umum, MK Wawasan PGRI ditempatkan pada semester awal, agar sejak awal mahasiswa mengenal identitas dan kultur universitas, serta mampu mengaitkan proses

studinya dengan nilai perjuangan PGRI. Beban belajar mata kuliah dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai ketentuan kurikulum universitas, dan berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan, khususnya dalam ranah sikap dan nilai (kepribadian, kebangsaan, kependidikan) serta pengetahuan kelembagaan dan profesi.

3. Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti mata kuliah Wawasan PGRI, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, serta kepribadian yang baik sesuai nilai-nilai Pancasila; berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air dan bahasa nasional serta mendukung perdamaian dunia; mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama, serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas (CPL-01). Mahasiswa juga harus mampu menerapkan nilai-nilai ke-PGRI-an dan falsafah Tri Hita Karana (nilai kearifan lokal masyarakat Hindu Bali) dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di kampus maupun di masyarakat dan di dudika (dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja) (CPL-03). Selanjutnya CPL-01 dan CPL-03 dijabarkan sebagai berikut:

a. Sikap dan nilai Ke-PGRI-an

- 1) Menunjukkan rasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan PGRI sebagai organisasi perjuangan di bidang pendidikan.
- 2) Mengembangkan sikap pengabdian, kepedulian, dan tanggung jawab sosial yang kuat terhadap peningkatan mutu pendidikan dan kehidupan masyarakat.
- 3) Menjunjung tinggi etika, integritas, serta semangat kejujuran guru dan pendidik sebagaimana diwariskan dalam sejarah dan nilai-nilai PGRI.

b. Pengetahuan tentang PGRI dan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

- 1) Memahami sejarah lahir dan perkembangan PGRI sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan guru di Indonesia.
- 2) Mengetahui visi, misi, tujuan, dan nilai dasar PGRI serta perannya dalam pembangunan pendidikan nasional.

- 3) Memahami sejarah berdirinya Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, landasan filosofis dan yuridisnya, serta kaitannya dengan PGRI sebagai badan penyelenggara/pembina.
- 4) Mengetahui visi, misi, tujuan, dan arah pengembangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, termasuk profil lulusan yang ingin dihasilkan.

c. Keterampilan reflektif dan peran ke depan sebagai insan PGRI

- 1) Mampu merefleksikan pengalaman belajar dan rencana kariernya (sebagai calon pendidik/profesional) dalam kerangka nilai-nilai Ke-PGRI-an dan pengabdian pada pendidikan.
- 2) Mampu mengidentifikasi berbagai tantangan pendidikan nasional (misalnya mutu guru, pemerataan pendidikan, karakter peserta didik) dan mengaitkannya dengan peran PGRI dan lulusan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- 3) Mampu mengemukakan gagasan atau inisiatif sederhana yang mencerminkan kontribusi nyata mahasiswa terhadap lingkungan pendidikan dan masyarakat, selaras dengan nilai perjuangan PGRI.

4. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi mata kuliah Wawasan PGRI mencakup, namun tidak terbatas pada, pokok-pokok bahasan berikut:

a. Sejarah dan jati diri PGRI

- 1) Latar historis lahirnya PGRI dalam konteks perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.
- 2) Perkembangan PGRI dari masa ke masa: sebagai organisasi perjuangan, profesi, dan ketenagakerjaan.
- 3) Peran PGRI dalam memperjuangkan harkat martabat guru, peningkatan mutu pendidikan, dan kebijakan pendidikan nasional.
- 4) Nilai-nilai dasar perjuangan PGRI: pengabdian, perjuangan, keikhlasan, kejujuran, persatuan, dan kecintaan pada tanah air.

b. PGRI sebagai organisasi profesi dan ketenagakerjaan guru

- 1) Konsep organisasi profesi dan pentingnya profesionalisme guru dalam sistem pendidikan nasional.
- 2) Struktur organisasi PGRI (pusat, wilayah, cabang, dan seterusnya) serta bentuk-bentuk kegiatan organisasi.

- 3) Peran PGRI dalam pembinaan kompetensi guru, perlindungan profesi, advokasi kebijakan pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan anggota.
- 4) Etika profesi guru dan kode etik PGRI sebagai pedoman sikap dan perilaku pendidik.

c. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam keluarga besar PGRI

- 1) Sejarah pendirian dan perkembangan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
- 2) Visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan profil lulusan universitas.
- 3) Posisi dan peran universitas dalam mendukung visi besar PGRI, terutama dalam menyiapkan calon guru dan tenaga profesional yang berkarakter.
- 4) Kultur akademik dan tradisi keilmuan yang ingin dibangun di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, termasuk semangat pengabdian, penelitian aplikatif, dan pemberdayaan masyarakat.

d. Nilai-nilai Ke-PGRI-an dalam pengembangan diri mahasiswa

- 1) Penginternalisasian nilai pengabdian, kepemimpinan, keteladanan, serta semangat belajar sepanjang hayat (lifelong learning).
- 2) Kepekaan sosial dan kepedulian terhadap persoalan pendidikan di lingkungan sekitar, termasuk isu-isu seperti putus sekolah, literasi, karakter, dan ketimpangan akses pendidikan.
- 3) Peran mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change) di bidang pendidikan dan sosial, baik selama studi maupun setelah lulus.

e. Ke-PGRI-an, kebangsaan, dan tantangan pendidikan di era global

- 1) Keterkaitan nilai-nilai PGRI dengan semangat kebangsaan, Pancasila, dan keutuhan NKRI.
- 2) Tantangan pendidikan di era digital dan globalisasi: perubahan karakter peserta didik, disrupti teknologi, persaingan global, dan kebutuhan penguatan karakter.
- 3) Peluang dan tantangan bagi PGRI dan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam merespons dinamika baru dunia pendidikan.
- 4) Refleksi dan gagasan mahasiswa tentang kontribusi yang dapat diberikan sebagai bagian dari keluarga besar PGRI untuk memajukan pendidikan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

M. Pendidikan Karakter dan Tri Hita Karana

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah **Tri Hita Karana** disusun sebagai mata kuliah penciri Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang berfungsi memperkuat visi universitas dalam membangun insan akademik yang harmonis dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Tri Hita Karana—sebagai konsep kearifan lokal yang berakar kuat dalam budaya dan agama Hindu di Bali—dipahami dalam mata kuliah ini sebagai falsafah hidup universal tentang pentingnya menjaga keseimbangan hubungan: *parhyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan), *pawongan* (hubungan manusia dengan sesama), dan *palemahan* (hubungan manusia dengan alam/lingkungan).

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajak memahami landasan filosofis, historis, dan sosiokultural Tri Hita Karana, sekaligus melihat relevansinya dengan pendidikan, pembangunan berkelanjutan, tata kelola lembaga, dan kehidupan sehari-hari di era modern. Pembelajaran tidak berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi menekankan internalisasi dan praktik nilai-nilai harmoni, toleransi, kepedulian sosial, dan kepedulian lingkungan dalam kehidupan pribadi, akademik, dan sosial. Secara kontekstual, mata kuliah ini juga mengintegrasikan nilai-nilai Pendidikan karakter dan falsafah Tri Hita Karana sebagai landasan karakter lulusan yang humanis, berbudaya, berkelanjutan, dan relevan dengan kehidupan kampus, masyarakat, serta DUDIKA. Dengan demikian, mata kuliah Pendidikan Karakter dan Tri Hita Karana diharapkan menjadi salah satu pilar pembentukan karakter lulusan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang berakar pada kearifan lokal namun berpandangan global.

2. Kedudukan dalam Kurikulum dan SKS

Mata kuliah Pendidikan Karakter dan Tri Hita Karana merupakan Mata Kuliah Penciri Universitas yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, tanpa membedakan program studi dan bidang ilmu sebagai fondasi pembentukan karakter dan jati diri lulusan. Kedudukannya sangat strategis karena secara langsung mencerminkan **visi universitas** yang menjadikan Tri Hita Karana sebagai dasar pengembangan budaya akademik, pengelolaan kelembagaan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Secara umum, MK Pendidikan Karakter dan Tri Hita Karana ditempatkan pada semester awal atau menengah, agar mahasiswa dapat mengaitkan nilai-nilainya dengan pengalaman belajar dan aktivitas di kampus sejak dini. Beban belajar dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester

(SKS) sesuai ketentuan kurikulum universitas, dan capaian pembelajarannya dikaitkan dengan profil lulusan yang religius/spiritual, peduli sosial, dan peduli lingkungan, sekaligus mampu menerjemahkan nilai-nilai lokal dalam konteks global dan lintas budaya.

3. Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti mata kuliah Pendidikan Karakter dan Tri Hita Karana, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, serta kepribadian yang baik sesuai nilai-nilai Pancasila; berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air dan bahasa nasional serta mendukung perdamaian dunia; mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama, serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas (CPL-01). Mahasiswa juga harus mampu menerapkan nilai-nilai ke-PGRI-an dan falsafah Tri Hita Karana (nilai kearifan lokal masyarakat Hindu Bali) dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di kampus maupun di masyarakat dan di dudika (dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja) (CPL-03). Selanjutnya CPL-01 dan CPL-03 dijabarkan sebagai berikut:

a. Sikap dan nilai

- 1) Menghargai nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Tri Hita Karana sebagai falsafah hidup yang menekankan keharmonisan hubungan dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan.
- 2) Menunjukkan sikap toleran, empatik, dan peduli terhadap orang lain, serta menjauhi perilaku yang menimbulkan konflik dan kerusakan sosial.
- 3) Menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesediaan berkontribusi dalam upaya menjaga keseimbangan ekologis.
- 4) Menginternalisasikan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kesederhanaan sebagai bagian dari praktik harmoni dalam kehidupan sehari-hari.

b. Pengetahuan tentang konsep dan pengembangan Tri Hita Karana

- 1) Memahami konsep dan urgensi pendidikan karakter dalam konteks pendidikan tinggi, kebijakan nasional, dan OBE
- 2) Memahami sejarah, makna, dan unsur-unsur Tri Hita Karana (parhyangan, pawongan, palemahan) dalam konteks budaya dan agama Hindu di Bali.

- 3) Mengetahui bagaimana Tri Hita Karana diadopsi dan dikembangkan dalam berbagai bidang: pendidikan, pariwisata, tata ruang, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola kelembagaan.
- 4) Memahami hubungan Tri Hita Karana dengan nilai-nilai Pancasila, kebhinekaan, dan pembangunan karakter bangsa.
- 5) Mengetahui konsep-konsep terkait, seperti harmoni sosial, kearifan lokal, spiritualitas, dan ekologi dalam perspektif Tri Hita Karana.

c. Keterampilan analitis, reflektif, dan aplikatif

- 1) Mampu menganalisis berbagai fenomena sosial, pendidikan, dan lingkungan dengan menggunakan perspektif Tri Hita Karana.
- 2) Mampu merefleksikan pengalaman pribadi dan kehidupan kampus dalam kerangka parhyangan, pawongan, dan palemahan, serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki.
- 3) Mampu merancang gagasan atau kegiatan sederhana (misalnya program/kegiatan kampus atau komunitas) yang mencerminkan implementasi nilai Pendidikan Karakter dan Tri Hita Karana.
- 4) Mampu mengomunikasikan gagasan tentang Pendidikan Karakter dan Tri Hita Karana secara lisan maupun tertulis dengan bahasa yang runtut, argumentatif, dan menghargai keberagaman.
- 5) Mampu menunjukkan keteladanan sikap dan perilaku sebagai insan akademik yang berkarakter, berbudaya, dan bertanggung jawab dalam ruang fisik maupun digital

4. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi mata kuliah Pendidikan Karakter dan Tri Hita Karana mencakup, namun tidak terbatas pada, pokok-pokok bahasan berikut:

a. Pendidikan Karakter dalam Perguruan Tinggi

- 1) Konsep karakter dalam SN-Dikti dan OBE
- 2) Urgensi penguatan karakter lulusan

b. Landasan filosofis dan historis Tri Hita Karana

- 1) Asal-usul dan perkembangan konsep Tri Hita Karana dalam tradisi Hindu-Bali.
- 2) Pengertian dan makna parhyangan, pawongan, dan palemahan.
- 3) Tri Hita Karana sebagai kearifan lokal yang tumbuh dari pengalaman historis dan religius masyarakat Bali.
- 4) Relevansi Tri Hita Karana di tengah perubahan sosial, modernisasi, dan globalisasi.

c. Pendidikan Karakter, Spiritualitas, dan Kebangsaan

Konsep pendidikan karakter dalam SN-Dikti dan OBE; nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; etika spiritual dalam kehidupan akademik dan profesional; nilai Pancasila, kewarganegaraan, nasionalisme, cinta tanah air, bahasa nasional, serta komitmen terhadap perdamaian dunia

d. Keberagaman, Kepekaan Sosial, dan Keberlanjutan

Penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, dan pandangan; toleransi dan etika dialog dalam kehidupan demokratis; empati sosial, tanggung jawab kemasyarakatan, kepedulian lingkungan, serta keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

e. Parhyangan: hubungan manusia dengan Tuhan

- 1) Dimensi spiritualitas dan religiusitas dalam Tri Hita Karana.
- 2) Praktik-praktik keagamaan dan spiritual yang mendukung terbentuknya pribadi yang bersyukur, rendah hati, dan bermoral.
- 3) Penghormatan terhadap kebebasan beragama dan keberagaman keyakinan dalam kerangka parhyangan.
- 4) Peran nilai spiritual dalam kehidupan akademik: kejujuran ilmiah, ketekunan belajar, dan etika penelitian.

f. Pawongan: hubungan manusia dengan sesama

- 1) Konsep harmoni sosial, gotong royong, dan solidaritas dalam Tri Hita Karana.
- 2) Nilai toleransi, saling menghormati, dan penyelesaian konflik secara damai di lingkungan keluarga, kampus, dan masyarakat.
- 3) Praktik pawongan dalam kehidupan kampus: budaya kerja sama, organisasi kemahasiswaan, dan layanan kepada masyarakat.
- 4) Keterkaitan pawongan dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan persatuan bangsa.

g. Palemahan: hubungan manusia dengan alam/lingkungan

- 1) Makna palemahan sebagai ajakan untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan alam dan lingkungan.
- 2) Isu-isu lingkungan kontemporer: degradasi lingkungan, sampah, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam.
- 3) Tri Hita Karana dan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
- 4) Implementasi palemahan dalam kehidupan kampus dan masyarakat: gerakan hijau kampus, pengelolaan sampah, hemat energi, dan pelestarian ruang hidup.

h. Refleksi dan praktik Tri Hita Karana dalam kehidupan mahasiswa

- 1) Refleksi pribadi: bagaimana mahasiswa memaknai dan menghayati nilai-nilai Pendidikan karakter dan Tri Hita Karana dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Identifikasi masalah di lingkungan sekitar (kampus/masyarakat) yang terkait dengan disharmoni parhyangan, pawongan, atau palemahan.
- 3) Perancangan dan pelaksanaan kegiatan sederhana (projek mini) yang mengimplementasikan nilai Pendidikan Karakter dan Tri Hita Karana, misalnya aksi sosial, kegiatan lingkungan, atau program penguatan spiritualitas dan solidaritas.
- 4) Penyusunan laporan dan presentasi hasil refleksi/projek sebagai bagian dari pembelajaran dan penilaian.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MKWK DAN MKPU

A. Proses Pembelajaran

1. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan tahap awal yang sangat menentukan mutu pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) dan Mata Kuliah Penciri Universitas (MKPU) di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada tahap ini, dosen pengampu tidak hanya menyiapkan materi ajar, tetapi menyusun rancangan pembelajaran yang utuh, sistematis, dan selaras dengan standar nasional pendidikan tinggi serta kebijakan akademik universitas. Perencanaan yang baik memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas baik tatap muka, daring, maupun bentuk lain benar-benar mengarah pada pencapaian capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), penetapan metode, media, dan strategi pembelajaran harus dilakukan dengan penuh kesadaran pedagogis dan integritas akademik.

a. Penyusunan RPS sesuai standar nasional dan kebijakan universitas

RPS MKWK disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi, serta kebijakan kurikulum yang berlaku di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Dalam dokumen RPS, dosen perlu merumuskan keterkaitan yang jelas antara CPL, capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), dan indikator capaian pembelajaran pada setiap pokok bahasan. RPS sekurang-kurangnya memuat identitas mata kuliah, deskripsi singkat, CPL yang didukung, CPMK, bahan kajian, bentuk dan porsi kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, kriteria dan teknik penilaian, serta daftar pustaka utama dan pendukung.

Proses penyusunan RPS dilakukan secara terstruktur, dimulai dari analisis kebutuhan dan karakteristik mahasiswa, pemetaan peran mata kuliah dan MKPU dalam kurikulum, hingga penentuan urutan materi yang logis dan proporsional dengan beban SKS. Dosen pengampu diharapkan melakukan koordinasi dengan koordinator MKWK dan MKPU dan/atau tim pengembang kurikulum untuk menjamin keselarasan antar kelas dan antar program studi. RPS yang telah disusun selanjutnya disahkan oleh pimpinan program studi atau unit yang berwenang dan digunakan sebagai dokumen acuan utama dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembelajaran MKWK dan MKPU.

b. Penetapan metode, media, dan strategi pembelajaran

Penetapan metode, media, dan strategi pembelajaran dalam RPS harus didasarkan pada karakteristik MKWK dan MKPU yang berorientasi pada pembentukan sikap, nilai, dan cara berpikir kritis mahasiswa. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran diarahkan pada *student-centered learning*, yang memberi ruang luas bagi partisipasi aktif, refleksi, dan dialog. Dosen diharapkan memadukan berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, *problem based learning*, *project based learning*, simulasi, *role play*, dan refleksi tertulis, sehingga mahasiswa tidak hanya menerima informasi tetapi juga mengolah, mengkritisi, dan menginternalisasikan nilai-nilai yang dipelajari.

Pemilihan media pembelajaran juga perlu direncanakan secara cermat. Selain menggunakan bahan ajar tertulis (buku, artikel, modul), dosen dianjurkan memanfaatkan media digital, seperti *Learning Management System* (LMS Edlink), presentasi berbasis multimedia, video edukatif, maupun sumber belajar daring yang kredibel. Strategi pembelajaran hendaknya dirancang untuk mendorong interaksi yang sehat antara dosen dan mahasiswa maupun antarmahasiswa, baik melalui kegiatan tatap muka di kelas maupun melalui forum online. Setiap metode, media, dan strategi yang dipilih harus tercantum secara eksplisit dalam RPS, lengkap dengan penjelasan mengenai tujuan penggunaannya, bentuk kegiatan, serta keterkaitannya dengan pencapaian CPMK maupun MKPU dan nilai-nilai karakter yang ingin dibangun dalam MKWK maupun MKPU. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran menjadi landasan yang kokoh bagi terciptanya proses pembelajaran yang bermakna, efektif, dan selaras dengan misi universitas.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran MKWK dan MKPU merupakan tahap penerjemahan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ke dalam praktik nyata di kelas, baik dalam bentuk tatap muka, daring, maupun blended. Pada tahap ini, peran dosen tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan teladan bagi mahasiswa dalam menghayati nilai-nilai karakter, keagamaan, dan kebangsaan. Pelaksanaan pembelajaran yang baik menuntut pengelolaan kelas yang terencana, suasana belajar yang inklusif dan dialogis, serta konsistensi dalam mengintegrasikan nilai pada setiap pertemuan.

a. Pengelolaan pertemuan tatap muka, daring, atau blended

Pengelolaan pertemuan tatap muka, daring, maupun blended dalam MKWK dan MKPU harus memperhatikan ketercapaian capaian pembelajaran dan efektivitas interaksi antara

dosen dan mahasiswa. Pada pertemuan tatap muka, dosen bertanggung jawab mengelola kegiatan pembelajaran sesuai jadwal, memulai perkuliahan dengan penjelasan tujuan pertemuan, melakukan apersepsi, dan mengaitkan materi dengan pengalaman riil mahasiswa. Dosen juga perlu mengatur alokasi waktu untuk penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan refleksi, sehingga setiap sesi perkuliahan berjalan terstruktur dan tidak didominasi satu arah.

Dalam pembelajaran daring, dosen diharapkan memanfaatkan *Learning Management System* (LMS Edlink) dan platform komunikasi lainnya untuk menyelenggarakan perkuliahan sinkron (tatap muka virtual) maupun asinkron (penugasan, forum diskusi, unggahan materi). Kejelasan instruksi, ketepatan waktu, dan kehadiran dosen dalam memoderasi diskusi sangat menentukan kualitas pembelajaran. Sementara itu, dalam model *blended*, dosen perlu merancang kombinasi yang proporsional antara tatap muka dan daring, sehingga keduanya saling melengkapi dan tidak menimbulkan beban berlebih bagi mahasiswa. Pada semua moda pembelajaran, pencatatan kehadiran, dokumentasi kegiatan, serta evaluasi singkat di akhir sesi penting dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan pembelajaran yang akuntabel.

b. Penciptaan lingkungan belajar yang inklusif dan dialogis

Pelaksanaan pembelajaran MKWK dan MKPU harus menjamin bahwa setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif tanpa diskriminasi atas dasar agama, suku, jenis kelamin, latar belakang sosial, atau pandangan politik. Dosen perlu membangun suasana kelas yang aman, penuh saling menghargai, dan terbuka terhadap perbedaan pendapat. Hal ini dapat dilakukan dengan menyepakati aturan main (*classroom agreement*) di awal perkuliahan dalam bentuk kontrak kuliah, mendorong mahasiswa untuk menyampaikan pandangan secara santun, serta memastikan tidak ada bentuk perundungan, pelecehan, maupun ujaran kebencian dalam proses diskusi.

Pendekatan dialogis menjadi salah satu ciri penting pembelajaran MKWK dan MKPU. Dosen diharapkan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk bertanya, mengemukakan pendapat, dan berbagi pengalaman yang relevan dengan materi. Diskusi kelompok, studi kasus, dan presentasi dapat dimanfaatkan untuk melatih kemampuan mahasiswa mendengar dan menghargai perspektif orang lain. Dengan demikian, lingkungan belajar yang tercipta tidak hanya mendukung pencapaian aspek kognitif, tetapi juga menumbuhkan empati, toleransi, dan kemampuan bekerja sama di tengah keberagaman.

c. Integrasi nilai-nilai karakter, keagamaan, dan kebangsaan dalam setiap pertemuan

Ciri khas pelaksanaan pembelajaran MKWK dan MKPU adalah adanya integrasi nilai-nilai karakter, keagamaan, dan kebangsaan secara konsisten dalam setiap pertemuan kuliah. Integrasi ini tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi secara teoritis, tetapi harus tampak dalam pemilihan contoh kasus, cara dosen merespon pertanyaan, bentuk penugasan, serta pola interaksi dosen-mahasiswa. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kerja sama, toleransi, dan cinta tanah air perlu diangkat dan direfleksikan bersama mahasiswa dalam konteks situasi nyata yang mereka hadapi.

Dalam mata kuliah yang berlandaskan keagamaan, dosen diharapkan menghadirkan ajaran agama sebagai sumber inspirasi moral yang menumbuhkan sikap rendah hati, saling menghargai, dan menjauhi kekerasan maupun intoleransi. Pada mata kuliah yang lebih berorientasi kebangsaan, seperti Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, integrasi nilai dapat dilakukan melalui pembahasan isu-isu aktual kebangsaan dan refleksi tentang peran mahasiswa sebagai warga negara. Di samping itu, nilai integritas dan anti korupsi dapat ditekankan melalui penugasan yang melatih kejujuran akademik, larangan keras terhadap plagiarisme, dan penilaian yang objektif. Dengan cara demikian, setiap pertemuan MKWK dan MKPU menjadi ruang pembelajaran nilai yang hidup, bukan hanya rangkaian ceramah normatif, sehingga diharapkan membekas dalam cara berpikir dan bertindak mahasiswa.

3. Pengelolaan Kelas

Pengelolaan kelas dalam pembelajaran MKWK maupun MKPU merupakan bagian penting dari pelaksanaan perkuliahan yang bertujuan memastikan proses belajar berjalan tertib, efektif, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Dosen tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan materi, tetapi juga mengatur dinamika kelas, menegakkan tata tertib, serta membangun budaya akademik yang sehat. Dua aspek utama dalam pengelolaan kelas adalah penyusunan dan penegakan kontrak kuliah beserta tata tertib perkuliahan, serta pengaturan kehadiran, partisipasi, dan disiplin akademik mahasiswa.

a. Kontrak kuliah dan tata tertib perkuliahan

Kontrak kuliah merupakan kesepakatan awal antara dosen dan mahasiswa mengenai hak, kewajiban, dan aturan main selama satu semester perkuliahan. Pada pertemuan pertama, dosen diharapkan memaparkan secara jelas isi Rencana Pembelajaran Semester (RPS), termasuk tujuan mata kuliah, capaian pembelajaran, metode pembelajaran, bentuk penugasan,

sistem penilaian, serta jadwal pertemuan. Bersamaan dengan itu, dosen dan mahasiswa menyepakati tata tertib perkuliahan yang mencakup antara lain ketepatan waktu, etika berpakaian, penggunaan gawai di kelas, tata cara bertanya dan berdiskusi, serta larangan terhadap perilaku tidak etis seperti mencontek, plagiarisme, dan tindakan tidak sopan.

Kontrak kuliah tidak sekadar bersifat administratif, tetapi menjadi instrumen pendidikan karakter. Dengan melibatkan mahasiswa dalam proses penyepakatan aturan, dosen menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap suasana belajar yang akan tercipta. Tata tertib perkuliahan hendaknya disusun secara proporsional: tegas namun tetap manusiawi, memberikan ruang dialog dan penyelesaian masalah jika terjadi pelanggaran. Kontrak kuliah yang disepakati sebaiknya dituangkan secara tertulis, dibagikan kepada mahasiswa, dan diingatkan kembali pada momen-momen tertentu, terutama ketika menjelang evaluasi tengah dan akhir semester.

b. Kehadiran, partisipasi, dan disiplin akademik

Kehadiran dan partisipasi aktif mahasiswa merupakan indikator penting keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran MKWK dan MKPU. Dosen perlu menetapkan kebijakan kehadiran sesuai ketentuan akademik universitas, misalnya batas minimal persentase kehadiran untuk dapat mengikuti ujian akhir. Pencatatan kehadiran hendaknya dilakukan secara tertib pada setiap pertemuan, baik untuk perkuliahan tatap muka, daring sinkron, maupun kegiatan belajar lainnya yang diakui sebagai bagian dari jam tatap muka terstruktur. Di samping itu, kehadiran tidak boleh dipahami sekadar sebagai “hadir secara fisik atau daring”, tetapi diikuti dengan keterlibatan nyata dalam diskusi, tugas, dan aktivitas pembelajaran lainnya.

Partisipasi akademik mahasiswa dapat didorong melalui pemberian kesempatan bertanya, mengemukakan pendapat, dan terlibat dalam kerja kelompok. Dosen dapat memasukkan aspek partisipasi sebagai salah satu komponen penilaian proses, dengan kriteria yang jelas dan transparan. Disiplin akademik mencakup ketepatan waktu mengumpulkan tugas, ketaatan pada prosedur ujian, serta kepatuhan terhadap standar integritas ilmiah, terutama terkait plagiarisme dan kejujuran dalam mengerjakan tugas. Dalam konteks MKPU yang berorientasi pada pembentukan karakter, penegakan disiplin akademik perlu disertai penjelasan edukatif mengenai pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap proses belajar. Dengan demikian, pengelolaan kehadiran, partisipasi, dan disiplin bukan hanya untuk menjaga keteraturan administrasi perkuliahan, tetapi juga menjadi sarana

pembiasaan perilaku positif yang diharapkan terbawa dalam kehidupan akademik dan profesional mahasiswa di masa depan.

4. Monitoring Dan Evaluasi Proses Pembelajaran

Monitoring dan evaluasi (monev) proses pembelajaran MKWK merupakan bagian integral dari sistem penjaminan mutu akademik di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran berjalan sesuai dengan RPS, memenuhi standar nasional dan kebijakan universitas, serta benar-benar mengarah pada pencapaian capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Monev tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai sarana pembinaan, perbaikan, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, program studi/fakultas dan lembaga penjaminan mutu internal memiliki peran saling melengkapi dalam mengawal kualitas pembelajaran MKWK dan MKPU.

a. Program studi/fakultas

Program studi dan fakultas merupakan unit terdepan yang bertanggung jawab langsung terhadap penyelenggaraan MKWK maupun MKPU di tingkat operasional. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada level ini umumnya mencakup beberapa aspek, antara lain kesesuaian pelaksanaan perkuliahan dengan jadwal, keterlaksanaan RPS, ketepatan waktu pengisian nilai, serta kualitas interaksi dosen–mahasiswa. Ketua program studi atau koordinator mata kuliah dapat melakukan pemantauan melalui berbagai cara, seperti peninjauan dokumen RPS dan bahan ajar, pemeriksaan kehadiran dosen dan mahasiswa, umpan balik dari mahasiswa melalui kuesioner, maupun observasi langsung ke kelas (*classroom visit*) jika diperlukan.

Hasil monitoring di tingkat program studi/fakultas kemudian dibahas dalam forum akademik, misalnya rapat dosen, untuk mengidentifikasi kendala, kebutuhan dukungan, dan peluang perbaikan. Program studi/fakultas juga bertanggung jawab memberikan rekomendasi dan tindak lanjut kepada dosen pengampu, baik dalam bentuk pembinaan, pelatihan, penyesuaian beban tugas, maupun pengembangan perangkat pembelajaran. Dengan demikian, monev di tingkat program studi/fakultas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu harian/semesteran yang dekat dengan praktik pembelajaran, sekaligus sebagai jembatan komunikasi antara dosen, mahasiswa, dan pimpinan akademik.

b. Lembaga penjaminan mutu internal

Badan penjaminan mutu internal (BPM) maupun Gugus penjaminan Mutu (GPM) UPMI berperan melakukan monitoring dan evaluasi secara lebih makro dan sistematis terhadap penyelenggaraan pembelajaran, termasuk MKWK maupun MKPU, di tingkat universitas. Fokus monev pada level ini bukan hanya pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan standar mutu yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Lembaga penjaminan mutu dapat melakukan audit akademik berkala, telaah dokumen (RPS, kontrak kuliah, instrumen penilaian), analisis hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa, serta peninjauan keselarasan antara CPL–CPMK–bahan kajian–metode–penilaian pada mata kuliah MKWK.

Temuan dari proses monitoring dan evaluasi kemudian dirangkum dalam laporan mutu yang berisi kekuatan, kelemahan, serta rekomendasi perbaikan pada tingkat prodi, fakultas, maupun universitas. Lembaga penjaminan mutu juga bertugas memfasilitasi tindak lanjut, misalnya melalui penyusunan panduan pembelajaran, workshop peningkatan kapasitas dosen (*capacity building*), ataupun peninjauan kembali kebijakan akademik terkait MKWK maupun MKPU. Dengan cara ini, monev yang dilakukan lembaga penjaminan mutu internal berkontribusi pada siklus peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*), sehingga pelaksanaan pembelajaran MKWK dan MKPU di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia tidak bersifat statis, tetapi senantiasa disesuaikan dengan perkembangan standar nasional, kebutuhan pemangku kepentingan, dan dinamika tantangan zaman.

B. Metoda Pembelajaran MKWK dan MKPU

1. Prinsip umum:

Metoda pembelajaran Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) maupun Mata Kuliah Penciri Universitas (MKPU) di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dirancang untuk tidak sekadar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk cara berpikir, sikap, dan karakter mahasiswa. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus sejalan dengan tuntutan pendidikan tinggi modern, yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Secara umum, pembelajaran MKWK dan MKPU berlandaskan tiga prinsip utama, yaitu *student-centered learning*, *active learning* dan *critical thinking*, serta pembelajaran yang kontekstual dan berbasis masalah nyata. Ketiga prinsip ini saling terkait dan menjadi dasar bagi dosen dalam memilih metode, strategi, dan media pembelajaran pada setiap pertemuan.

a. *Student centered learning*

Prinsip *student-centered learning* menempatkan mahasiswa sebagai pusat kegiatan belajar, sementara dosen berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Dalam kerangka ini, pembelajaran tidak lagi didominasi ceramah satu arah, tetapi memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi, mengolah, dan mengonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman dan wawasannya sendiri. Dosen diharapkan merancang aktivitas yang mendorong kemandirian belajar, seperti diskusi kelompok, tugas proyek, studi kasus, pemecahan masalah, dan refleksi individu.

Dengan pola pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, MKWK maupun MKPU diorientasikan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap proses belajar, meningkatkan kepercayaan diri, dan melatih keterampilan sosial mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami materi, tetapi juga diajak untuk mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, realitas sosial, dan nilai-nilai yang dianutnya. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena berangkat dari kebutuhan dan potensi mahasiswa, bukan sekadar dari sudut pandang pengajar.

b. *Active learning dan critical thinking*

Prinsip *active learning* menekankan pentingnya keterlibatan aktif mahasiswa, baik secara fisik, mental, maupun emosional, dalam setiap tahapan pembelajaran. Mahasiswa didorong untuk bertanya, mengemukakan pendapat, mengkritisi gagasan, dan terlibat dalam kerja sama tim. Kegiatan seperti diskusi terstruktur, debat, presentasi, *role play*, simulasi, maupun analisis studi kasus dapat digunakan untuk mengaktifkan mahasiswa. Dosen berperan mengelola dinamika kelas agar setiap mahasiswa memiliki kesempatan berpartisipasi, bukan hanya segelintir orang yang dominan.

Seiring dengan itu, pengembangan *critical thinking* menjadi salah satu fokus penting dalam pembelajaran MKWK maupun MKPU. Mahasiswa dilatih untuk tidak menerima informasi secara pasif, tetapi memeriksanya secara rasional, menimbang bukti, membandingkan berbagai sudut pandang, dan menarik kesimpulan yang bertanggung jawab. Dalam konteks MKWK yang sarat muatan nilai (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia) maupun MKPU (Pendidikan Anti Korupsi, Literasi Digital, Pendidikan Karakter dan Tri Hita Karana, Kewirahusahaan), berpikir kritis sangat penting agar mahasiswa mampu membedakan antara fakta dan opini, ajaran pokok dan tafsir, serta nilai yang bersifat universal dan praktik sosial yang mungkin menyimpang. Dengan demikian,

active learning dan *critical thinking* menjadikan pembelajaran MKWK maupun MKPU sebagai proses dialogis yang membentuk kedewasaan intelektual dan moral mahasiswa.

c. Kontekstual dan berbasis masalah nyata

Prinsip pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah nyata menuntut agar MKWK maupun MKPU tidak diajarkan secara abstrak dan terlepas dari kehidupan sehari-hari, melainkan selalu dikaitkan dengan realitas sosial, budaya, politik, dan moral yang sedang dihadapi masyarakat. Dosen diharapkan menggunakan contoh kasus aktual, fenomena yang dekat dengan kehidupan mahasiswa, serta pengalaman nyata di lingkungan kampus dan masyarakat. Dengan demikian, mahasiswa dapat melihat relevansi langsung antara materi yang dipelajari dengan persoalan kehidupan yang mereka saksikan dan alami.

Pendekatan berbasis masalah (*problem-based learning*) mendorong mahasiswa untuk mengidentifikasi persoalan, menganalisis akar masalah, mencari alternatif solusi, dan merefleksikan nilai-nilai yang terlibat di dalamnya. Misalnya, isu intoleransi, kekerasan, hoaks, korupsi, konflik lingkungan, atau degradasi moral dapat dijadikan bahan kajian pada mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, maupun pendidikan anti korupsi. Dengan cara ini, pembelajaran MKWK tidak hanya menghasilkan pemahaman teoretis, tetapi juga membentuk kemampuan mahasiswa merespon persoalan nyata secara arif, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai-nilai luhur yang menjadi rujukan perguruan tinggi.

2. Pendekatan dan Strategi Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran MKWK maupun MKPU memerlukan variasi pendekatan dan strategi agar proses belajar tidak hanya informatif, tetapi juga dialogis, reflektif, dan menyentuh pembentukan karakter. Dosen diharapkan tidak terpaku pada satu metode, melainkan memadukan beberapa pendekatan sesuai karakteristik materi, tujuan pembelajaran, serta profil mahasiswa. Beberapa strategi yang dianjurkan dalam pembelajaran MKWK dan MKPU di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Ceramah interaktif

Ceramah tetap memiliki peran penting sebagai sarana untuk memberikan landasan konseptual dan kerangka berpikir yang sistematis kepada mahasiswa. Namun, ceramah yang digunakan dalam MKWK maupun MKPU harus bersifat interaktif, bukan monolog satu arah. Dosen dianjurkan menyisipkan pertanyaan pemantik, meminta tanggapan, atau mengundang komentar mahasiswa di sela-sela penjelasan materi. Penggunaan contoh konkret, ilustrasi,

dan analogi yang dekat dengan kehidupan mahasiswa akan membantu materi yang bersifat normatif atau abstrak menjadi lebih mudah dipahami. Dengan demikian, ceramah interaktif bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga memancing keterlibatan kognitif dan emosional mahasiswa.

b. Diskusi kelompok dan presentasi

Diskusi kelompok dan presentasi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berlatih bekerja sama, mengorganisasi gagasan, dan menyampaikan pandangan secara sistematis. Dosen dapat membagi mahasiswa ke dalam kelompok kecil untuk membahas suatu topik, teks, atau kasus tertentu yang berkaitan dengan materi MKWK maupun MKPU, misalnya isu keagamaan, kebangsaan, kewarganegaraan, bahasa ilmiah, atau integritas. Setiap kelompok kemudian diminta mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, sementara kelompok lain memberikan tanggapan. Melalui strategi ini, mahasiswa belajar mendengar dan menghargai pendapat orang lain, menyepakati argumen bersama, sekaligus melatih keberanian berbicara di forum. Dosen berperan sebagai moderator dan pengarah, memastikan diskusi berjalan tertib, fokus, dan tetap dalam koridor nilai-nilai keilmuan dan etika akademik.

c. *Problem Based Learning* (PBL) dan *Project Based Learning* (PjBL)

Pendekatan *Problem Based Learning* (PBL) dan *Project Based Learning* (PjBL) sangat relevan digunakan dalam MKWK maupun MKPU karena mendorong mahasiswa berhadapan langsung dengan persoalan nyata yang memerlukan pemikiran kritis dan kerja kolaboratif. Dalam PBL, mahasiswa diberikan suatu masalah atau dilema yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa, atau antikorupsi, kemudian diminta mengidentifikasi akar masalah, mencari data pendukung, dan merumuskan alternatif solusi. Sementara itu, dalam PjBL, mahasiswa mengerjakan sebuah proyek dalam rentang waktu tertentu, misalnya membuat kampanye literasi Pancasila, produk media edukasi anti korupsi, laporan studi lapangan toleransi beragama, atau modul diskusi etika akademik. Proyek ini menggabungkan unsur riset, kreativitas, kerja tim, serta presentasi hasil. Melalui PBL dan PjBL, mahasiswa belajar menghubungkan teori dengan praktik, mengembangkan keterampilan abad 21 (kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan pemecahan masalah), serta menginternalisasikan nilai-nilai MKWK dan MKPU secara lebih mendalam.

d. Studi kasus dan studi lapangan

Studi kasus digunakan untuk mengajak mahasiswa mengkaji situasi atau peristiwa tertentu secara lebih tajam dan terarah. Dosen dapat menyajikan kasus-kasus aktual, misalnya

konflik sosial, pelanggaran HAM, intoleransi, ujaran kebencian di media sosial, kasus korupsi, atau pelanggaran etika akademik—lalu meminta mahasiswa menganalisisnya berdasarkan nilai-nilai agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan prinsip integritas.

Jika memungkinkan, pembelajaran dapat diperkaya dengan studi lapangan, misalnya kunjungan ke lembaga keagamaan, institusi pemerintah, lembaga sosial, komunitas masyarakat, atau situs bersejarah. Melalui studi lapangan, mahasiswa berkesempatan mengamati langsung praktik nilai-nilai yang dipelajari, berdialog dengan narasumber, dan melihat dinamika sosial secara nyata. Hasil studi kasus dan studi lapangan kemudian diolah dalam bentuk laporan, presentasi, atau refleksi tertulis. Strategi ini membantu mahasiswa menghubungkan materi kuliah dengan kondisi nyata yang ada di masyarakat.

e. Refleksi dan penugasan individual/kelompok

Refleksi merupakan bagian penting dalam pembelajaran MKWK dan MKPU karena membantu mahasiswa menyadari hubungan antara pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman pribadi, sikap, dan rencana tindak ke depan. Refleksi dapat dilakukan secara lisan di akhir perkuliahan, melalui jurnal reflektif, esai singkat, maupun umpan balik tertulis mengenai topik tertentu. Dosen dapat mengarahkan refleksi dengan pertanyaan panduan, misalnya: “Apa nilai yang paling berkesan hari ini?”, “Bagaimana materi ini berkaitan dengan kehidupan Anda?”, atau “Perubahan apa yang ingin Anda lakukan setelah mempelajari topik ini?”.

Penugasan individual dan kelompok dirancang bukan sekadar untuk mengukur penguasaan materi, tetapi juga untuk melatih kemandirian, tanggung jawab, dan kerja sama. Tugas dapat berupa membaca artikel dan menulis ringkasan kritis, menyusun makalah, membuat produk kreatif, merancang kampanye nilai, atau menyusun rencana aksi sederhana. Dosen perlu menjelaskan rubrik penilaian secara transparan, termasuk aspek-aspek yang dinilai seperti ketepatan isi, kedalaman analisis, kerapian penulisan, dan kejujuran akademik. Melalui refleksi dan penugasan yang dirancang dengan baik, proses pembelajaran MKWK dan MKPU diharapkan tidak hanya mengubah cara berpikir mahasiswa, tetapi juga mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan nyata.

3. Pemanfaatan Teknologi dan Media

Pemanfaatan teknologi dan media dalam pembelajaran MKWK dan MKPU merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan daya tarik proses belajar-mengajar. Teknologi tidak dimaksudkan menggantikan peran dosen, tetapi menjadi alat bantu

yang memperkaya interaksi, mempermudah distribusi materi, serta memperluas ruang belajar melampaui batas kelas fisik. Dalam konteks Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, pemanfaatan *Learning Management System* (LMS Edlink) dan berbagai bentuk multimedia, video, serta sumber belajar digital perlu direncanakan dan diintegrasikan secara sadar ke dalam RPS, sehingga penggunaannya tepat sasaran dan selaras dengan capaian pembelajaran MKWK.

a. *Learning Management System* (LMS)

Learning Management System (LMS Edlink) digunakan sebagai platform utama untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan pembelajaran MKWK dan MKPU, baik dalam moda tatap muka terintegrasi teknologi, daring, maupun blended. Melalui SIAKAD dan Edlink, dosen dapat mengunggah RPS, bahan ajar, artikel, bahan tayang, maupun tautan ke sumber belajar lain yang relevan. Selain itu, LMS Edlink dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pengumuman, mengatur jadwal pertemuan, mengunggah tugas, mengelola kuis/ujian daring, serta memfasilitasi forum diskusi antara dosen dan mahasiswa.

Dengan pemanfaatan LMS, rekam jejak pembelajaran menjadi lebih terdokumentasi dan transparan. Mahasiswa dapat mengakses materi kapan saja sesuai kebutuhan, mengulang topik yang belum dipahami, serta memantau kemajuan belajarnya melalui fitur penugasan dan umpan balik dosen. Bagi dosen, LMS membantu mengelola kelas dengan lebih efisien, memonitor partisipasi mahasiswa, dan menyusun laporan pembelajaran yang diperlukan untuk keperluan monitoring dan evaluasi. Penggunaan LMS Edlink dalam MKWK maupun MKPU juga menjadi sarana pembiasaan mahasiswa terhadap budaya literasi digital dan etika berkomunikasi di ruang virtual.

b. Multimedia, video, dan sumber belajar digital

Selain LMS Edlink, pembelajaran MKWK dan MKPU dianjurkan memanfaatkan multimedia, video, dan berbagai sumber belajar digital untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa. Bahan ajar tidak hanya berupa teks cetak, tetapi dapat berupa presentasi berbasis multimedia, infografis, film pendek, dokumenter, rekaman ceramah tokoh, podcast, maupun konten edukatif lain yang relevan dengan tema mata kuliah. Penggunaan video dan multimedia sangat membantu ketika materi berkaitan dengan isu-isu aktual, fenomena sosial, sejarah, praktik keagamaan, atau contoh kasus yang lebih mudah dipahami melalui visual dan audio.

Dosen juga dapat mengarahkan mahasiswa untuk mengakses sumber belajar digital yang kredibel, seperti repositori ilmiah, jurnal daring, portal resmi lembaga negara, maupun laman

edukasi yang berkaitan dengan agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan anti korupsi, maupun MKPU, seperti Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Karakter dan Tri Hita Karana, MK Literasi Digital serta MK Kewirahusahaan. Namun, pemanfaatan sumber digital perlu dibarengi dengan pembinaan literasi informasi, yaitu kemampuan menilai keandalan sumber, membedakan fakta dan opini, serta menghindari sebaran hoaks dan konten yang tidak bertanggung jawab. Dengan integrasi yang tepat, teknologi dan media digital tidak hanya menjadikan pembelajaran MKWK maupun MKPU lebih menarik, tetapi juga melatih mahasiswa menjadi pengguna informasi yang kritis, etis, dan bertanggung jawab.

4. Integrasi Nilai

Salah satu ciri utama pembelajaran MKWK dan MKPU di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah adanya integrasi nilai secara konsisten dalam setiap mata kuliah, bukan hanya pada mata kuliah yang secara eksplisit memuat tema tertentu. Nilai-nilai anti korupsi, toleransi, kebhinekaan, dan moderasi beragama tidak diajarkan sebagai “materi tambahan” yang berdiri sendiri, tetapi ditenun ke dalam tujuan, materi, metode, dan penilaian pembelajaran. Dengan cara ini, MKWK dan MKPU berfungsi tidak hanya sebagai wahana penyampaian pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan kepekaan moral mahasiswa.

a. Integrasi nilai anti korupsi di setiap MKWK dan MKPU

Integrasi nilai anti korupsi di setiap MKWK dan MKPU dimaksudkan untuk menumbuhkan budaya integritas secara menyeluruh di lingkungan kampus. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan, manusia-manusia, serta hubungan manusia dengan lingkungan terkait kepentingan umum perlu dihadirkan dalam berbagai aspek pembelajaran. Pada tingkat perencanaan, dosen dapat merumuskan capaian pembelajaran yang mencantumkan dimensi integritas, misalnya “menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam proses belajar dan penilaian.” Dalam penyajian materi, dosen dapat mengaitkan topik yang dibahas dengan isu-isu korupsi, kecurangan, dan penyalahgunaan wewenang, lalu mengajak mahasiswa menganalisis dampak dan mencari alternatif solusi berdasarkan nilai-nilai agama, Pancasila, dan etika profesi. Dalam praktik perkuliahan, integrasi nilai antikorupsi tampak melalui penegakan kejujuran akademik: larangan mencontek, plagiarisme, manipulasi data, maupun “titip absen”. Penugasan dirancang sedemikian rupa agar mendorong kerja mandiri dan kerja sama yang sehat, bukan kerja sama dalam kecurangan. Penilaian dilakukan secara objektif dan

transparan, dengan kriteria yang jelas dan disosialisasikan sejak awal. Dosen juga perlu memberikan teladan perilaku berintegritas dalam hal ketepatan waktu, konsistensi aturan, dan keterbukaan terhadap masukan. Dengan demikian, pesan anti korupsi tidak hanya terdengar dalam kata-kata, tetapi dialami mahasiswa dalam budaya akademik sehari-hari.

b. Integrasi nilai toleransi, kebhinekaan, dan moderasi beragama

Sebagai perguruan tinggi yang berada dalam masyarakat majemuk, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menempatkan toleransi, kebhinekaan, dan moderasi beragama sebagai nilai yang harus dihidupkan di seluruh MKWK dan MKPU. Integrasi nilai ini dimulai dari pemilihan materi yang mencerminkan realitas keragaman Indonesia: keberagaman agama, budaya, bahasa, suku, dan pandangan politik. Dosen didorong untuk menyajikan contoh, kasus, dan sumber belajar yang menampilkan dialog, kerja sama, dan pengalaman hidup damai di tengah perbedaan, sekaligus membahas secara kritis fenomena intoleransi, ujaran kebencian, dan kekerasan atas nama identitas.

Dalam proses pembelajaran, kelas MKWK dan MKPU harus dikelola sebagai ruang aman (*safe space*) bagi semua mahasiswa untuk menyampaikan pendapat tanpa takut direndahkan atau diserang. Aturan diskusi yang menghormati perbedaan pandangan disepakati sejak awal, dan dosen berperan aktif mencegah munculnya sikap merendahkan keyakinan, suku, atau kelompok tertentu. Pada mata kuliah agama, moderasi beragama diintegrasikan melalui penekanan pada nilai-nilai universal seperti kasih, welas asih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, serta pengenalan ajaran yang menolak kekerasan dan pemaksaan keyakinan serta harmonisasi dengan lingkungan. Pada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, kebhinekaan dijelaskan sebagai kekayaan bangsa yang harus dikelola dengan semangat persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.

Melalui integrasi nilai-nilai tersebut dalam setiap pertemuan, diharapkan mahasiswa terbiasa melihat perbedaan sebagai kenyataan yang wajar dan perlu dikelola secara dewasa, bukan sebagai ancaman. Pembelajaran MKWK dan MKPU dengan demikian menjadi sarana pembentukan warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara sosial dan moral, siap hidup dan bekerja dalam masyarakat yang plural dengan sikap terbuka, adil, dan bertanggung jawab.

BAB IV

PENILAIAN PEMBELAJARAN MKWK DAN MKPU

A. Definisi Penilaian Pembelajaran

1. Pengertian Penilaian Pembelajaran Dalam Konteks Pendidikan Tinggi

Penilaian pembelajaran dalam konteks pendidikan tinggi merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan informasi mengenai pencapaian belajar mahasiswa dalam kaitannya dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Penilaian tidak hanya dimaknai sebagai pemberian nilai akhir, tetapi sebagai rangkaian kegiatan yang dirancang secara sadar sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut pembelajaran. Dalam Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) maupun Mata Kuliah Penciri Universitas (MKPU), penilaian mencakup pengukuran aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, kebhinekaan, bahasa, serta integritas dan anti korupsi. Oleh karena itu, penilaian harus dilakukan dengan prinsip valid, objektif, adil, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran.

2. Fungsi Penilaian

Dalam penyelenggaraan pembelajaran MKWK maupun MKPU, penilaian memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

a. Fungsi diagnostik

Penilaian berfungsi untuk mengidentifikasi kemampuan awal, karakteristik, dan kebutuhan belajar mahasiswa sebelum atau pada tahap awal perkuliahan. Informasi diagnostik ini membantu dosen memahami latar belakang pengetahuan, sikap, maupun keterampilan mahasiswa, sehingga dapat menyesuaikan pendekatan, materi, dan strategi pembelajaran yang tepat. Melalui penilaian diagnostik, dosen dapat mengetahui kesenjangan antara kondisi awal mahasiswa dan capaian pembelajaran yang diharapkan, serta merancang langkah-langkah intervensi yang diperlukan.

b. Fungsi formatif

Penilaian formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan bertujuan utama untuk memberikan umpan balik (*feedback*) kepada mahasiswa maupun dosen. Bagi mahasiswa, hasil penilaian formatif memberi gambaran tentang sejauh mana mereka telah memahami materi, menginternalisasikan nilai, dan mengembangkan keterampilan yang

diharapkan, sehingga dapat melakukan perbaikan diri. Bagi dosen, penilaian formatif menjadi alat untuk mengevaluasi efektivitas metode dan strategi mengajar yang digunakan, serta dasar untuk melakukan penyesuaian pada pertemuan berikutnya. Contoh penilaian formatif antara lain kuis, tugas mingguan, refleksi tertulis, diskusi terstruktur, dan presentasi.

c. Fungsi sumatif

Penilaian sumatif dilakukan pada akhir satuan waktu tertentu, misalnya akhir modul, tengah semester, atau akhir semester, untuk menilai pencapaian belajar mahasiswa secara keseluruhan. Dalam konteks MKWK maupun MKPU, penilaian sumatif biasanya diwujudkan dalam bentuk Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), proyek akhir, atau tugas komprehensif. Hasil penilaian sumatif digunakan untuk menentukan keberhasilan mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, yang kemudian dinyatakan dalam bentuk nilai akhir. Selain itu, penilaian sumatif juga memberikan gambaran kepada program studi dan universitas mengenai sejauh mana pembelajaran MKWK telah berjalan efektif.

3. Kedudukan Penilaian Sebagai Bagian Dari Sistem Penjaminan Mutu Akademik

Penilaian pembelajaran memiliki kedudukan strategis sebagai komponen utama dalam sistem penjaminan mutu akademik di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Melalui penilaian yang dirancang dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, perguruan tinggi memperoleh data objektif mengenai ketercapaian capaian pembelajaran pada tingkat mata kuliah, program studi, hingga tingkat institusi. Data tersebut menjadi dasar bagi kegiatan monitoring dan evaluasi, perbaikan kurikulum, pengembangan metode pembelajaran, serta peningkatan kompetensi dosen.

Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), penilaian pembelajaran MKWK dan MKPU terkait erat dengan siklus penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu (PPEPP). RPS, instrumen penilaian, rubrik, serta prosedur penilaian menjadi dokumen penting yang diaudit secara berkala oleh unit penjaminan mutu. Dengan demikian, penilaian tidak dipandang sekadar kewajiban administratif untuk menghasilkan nilai, tetapi sebagai bagian integral dari upaya sistematis universitas untuk memastikan bahwa proses pembelajaran MKWK maupun MKPU benar-benar menghasilkan lulusan yang sesuai dengan profil dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. Prinsip Penilaian

Penilaian pembelajaran MKWK dan MKPU di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan standar nasional pendidikan tinggi dan kebijakan akademik universitas. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi dosen dalam merancang instrumen, melaksanakan penilaian, mengolah hasil, dan menyampaikan umpan balik kepada mahasiswa. Penerapan prinsip yang benar akan memastikan bahwa penilaian bukan hanya menghasilkan angka, tetapi juga mendukung peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran.

Berikut prinsip-prinsip penilaian yang digunakan dalam pembelajaran MKWK:

1) Sahih (valid)

Penilaian dikatakan sahih apabila benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen penilaian harus disusun berdasarkan indikator capaian pembelajaran yang jelas, sehingga setiap soal atau tugas memiliki keterkaitan langsung dengan kompetensi yang ingin dicapai. Dalam konteks MKWK maupun MKPU, jika yang diukur adalah pemahaman nilai toleransi atau integritas, maka bentuk tugas harus memungkinkan mahasiswa menunjukkan pemahaman dan sikap tersebut, bukan sekadar menguji hafalan konsep. Dengan demikian, hasil penilaian dapat dipercaya sebagai cerminan kemampuan dan sikap mahasiswa yang sesungguhnya.

2) Objektif

Penilaian harus terbebas dari pengaruh subjektivitas personal, seperti rasa suka atau tidak suka terhadap mahasiswa. Dosen wajib menggunakan kriteria penilaian yang jelas, terukur, dan disepakati di awal, misalnya melalui rubrik penilaian. Penilaian terhadap tugas, presentasi, maupun ujian harus didasarkan pada kinerja dan hasil kerja mahasiswa, bukan pada faktor non-akademik. Penggunaan rubrik yang rinci dan standar penilaian yang konsisten akan membantu mengurangi bias, sehingga setiap mahasiswa dinilai secara proporsional sesuai usahanya.

3) Adil dan Transparan

Penilaian harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh mahasiswa, tanpa diskriminasi atas dasar agama, suku, jenis kelamin, latar belakang sosial, atau kedekatan pribadi. Prinsip keadilan juga mencakup pemberian tugas dan ujian yang wajar dan dapat diakses oleh semua mahasiswa. Di sisi lain, penilaian harus bersifat transparan: kriteria, bobot, dan prosedur penilaian disampaikan sejak awal perkuliahan, misalnya dalam RPS dan kontrak kuliah. Mahasiswa berhak mengetahui

dasar penilaian yang digunakan, serta memperoleh penjelasan apabila terdapat keraguan atau keberatan terhadap nilai yang diraih.

4) Terencana dan Berkesinambungan

Penilaian tidak dilakukan secara tiba-tiba atau insidental, tetapi direncanakan sejak awal dalam RPS sebagai bagian yang menyatu dengan proses pembelajaran. Bentuk dan jadwal penilaian, baik formatif maupun sumatif, disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan alur materi. Penilaian juga harus berkesinambungan, artinya dilakukan pada beberapa titik waktu selama satu semester, bukan hanya pada saat ujian tengah dan akhir. Dengan penilaian yang berkesinambungan, dosen dapat memantau perkembangan mahasiswa secara bertahap dan memberikan dukungan belajar yang tepat waktu.

5) Akuntabel dan Dapat Dipertanggungjawabkan

Seluruh proses penilaian mulai dari perancangan instrumen, pelaksanaan, pengolahan, hingga pelaporan nilai harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan administratif. Dosen wajib menyimpan bukti penilaian (lembar jawaban, tugas, rubrik penilaian, rekap nilai) sesuai ketentuan universitas, serta siap menjelaskan dasar pemberian nilai apabila diminta oleh mahasiswa atau pihak yang berwenang. Akuntabilitas juga mencakup kesesuaian penilaian dengan peraturan akademik, standar nasional, dan kebijakan penjaminan mutu yang berlaku.

6) Mendidik dan Memotivasi Belajar

Penilaian hendaknya tidak dipandang sebagai alat “menghukum” mahasiswa, tetapi sebagai sarana pendidikan. Hasil penilaian harus memberikan umpan balik yang konstruktif, membantu mahasiswa mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya, serta memotivasi untuk belajar lebih baik. Bentuk penilaian, termasuk cara penyampaian nilai dan komentar dosen, sebaiknya mendorong kejujuran, keberanian berpikir kritis, dan tanggung jawab, bukan menimbulkan rasa takut berlebihan atau apatis. Dalam konteks MKWK maupun MKPU, penilaian yang mendidik berarti juga menumbuhkan kesadaran nilai, seperti integritas, toleransi, dan kepedulian sosial.

7) Relevan dengan Capaian Pembelajaran (CPL dan CPMK)

Penilaian harus selalu dirancang dan dilaksanakan dengan merujuk pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang telah ditetapkan. Setiap tugas, ujian, atau bentuk penilaian lain perlu dianalisis keterkaitannya dengan CPL dan CPMK tersebut, sehingga dosen dan mahasiswa

memahami kompetensi apa yang sedang diukur. Dalam MKWK maupun MKPU, hal ini mencakup pengukuran aspek sikap (misalnya integritas, toleransi), pengetahuan (misalnya pemahaman ajaran agama, Pancasila, konstitusi), dan keterampilan (misalnya berpikir kritis, berkomunikasi secara ilmiah). Dengan relevansi yang kuat, hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pembelajaran, sekaligus bahan refleksi dalam pengembangan kurikulum dan metode mengajar.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas secara konsisten, penilaian pembelajaran MKWK diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan adil mengenai perkembangan mahasiswa, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan mutu akademik dan pembentukan karakter lulusan.

C. Teknik dan Instrumen Penilaian

1. Teknik Penilaian

Teknik penilaian dalam pembelajaran MKWK maupun MKPU di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dirancang untuk menangkap berbagai aspek perkembangan mahasiswa secara utuh, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, penilaian tidak hanya dilakukan melalui ujian tertulis di akhir perkuliahan, tetapi juga melalui observasi proses, penugasan, dan produk karya yang dihasilkan mahasiswa. Secara umum, teknik penilaian yang digunakan meliputi penilaian proses, penilaian produk, dan ujian.

a. Penilaian proses (kehadiran, partisipasi, sikap)

Penilaian proses berfokus pada keterlibatan mahasiswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek yang dinilai mencakup kehadiran, partisipasi aktif, serta sikap yang ditunjukkan di dalam maupun di luar kelas dalam konteks aktivitas akademik.

- 1) Kehadiran menunjukkan tingkat komitmen mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan secara teratur. Kehadiran yang baik mencerminkan kedisiplinan dan kesungguhan dalam belajar.
- 2) Partisipasi diukur dari keterlibatan mahasiswa dalam diskusi, kemampuan bertanya dan menjawab, kontribusi dalam kerja kelompok, serta kesediaan menyampaikan pendapat secara santun.
- 3) Sikap meliputi kejujuran, tanggung jawab, kerja sama, penghargaan terhadap perbedaan, dan kepatuhan terhadap tata tertib perkuliahan.

Penilaian proses biasanya dilakukan melalui observasi langsung dosen dengan bantuan lembar penilaian (rating scale atau rubrik), sehingga penilaian tidak bersifat sekadar kesan umum, tetapi didasarkan pada indikator yang jelas.

b. Penilaian produk (tugas, proyek, makalah, presentasi)

Penilaian produk diarahkan pada hasil kerja nyata mahasiswa yang dihasilkan selama satu semester, baik secara individual maupun kelompok. Bentuk produk dapat berupa:

- 1) Tugas tertulis, seperti rangkuman bacaan, esai reflektif, atau analisis kasus;
- 2) Proyek, misalnya kegiatan kampanye nilai, penyusunan media edukasi, atau laporan studi lapangan;
- 3) Makalah ilmiah, yang menunjukkan kemampuan mahasiswa menyusun argumen secara sistematis, menggunakan referensi yang relevan, dan menulis sesuai kaidah ilmiah;
- 4) Presentasi, yang menilai kemampuan mahasiswa menyampaikan gagasan secara lisan, menyusun bahan tayang, bekerja dalam tim, dan menjawab pertanyaan audiens.

Penilaian produk dilakukan dengan menggunakan rubrik penilaian yang mencakup aspek isi (ketepatan dan kedalaman materi), keterkaitan dengan nilai-nilai MKWK maupun MKPU (misalnya toleransi, integritas, kebangsaan), kerapian dan sistematika, serta aspek komunikasi lisan maupun tulisan. Dengan teknik ini, dosen dapat mengukur sejauh mana mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan dan nilai yang dipelajari dalam bentuk karya yang konkret.

c. Ujian (kuis, UTS, UAS)

Ujian merupakan teknik penilaian yang bertujuan mengukur penguasaan pengetahuan dan kemampuan berpikir mahasiswa pada titik waktu tertentu. Dalam pembelajaran MKWK, ujian dapat berbentuk:

- 1) Kuis, yang dilaksanakan secara berkala untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang baru saja dibahas dan memberikan umpan balik cepat bagi dosen dan mahasiswa;
- 2) Ujian Tengah Semester (UTS), yang menilai pencapaian mahasiswa pada pertengahan semester berdasarkan materi yang telah diajarkan;
- 3) Ujian Akhir Semester (UAS), yang mengukur pencapaian akhir mahasiswa terhadap keseluruhan capaian pembelajaran mata kuliah.

Bentuk soal ujian dapat berupa pilihan ganda, isian singkat, benar-salah, maupun uraian/esai. Untuk MKWK maupun MKPU yang sarat muatan nilai dan pengembangan

berpikir kritis, penggunaan soal uraian sangat dianjurkan agar mahasiswa dapat mengemukakan argumen, analisis, dan refleksi yang lebih mendalam. Ujian harus disusun berdasarkan kisi-kisi yang mengacu pada CPMK, sehingga cakupan materi, tingkat kesulitan, dan proporsi aspek yang diukur (pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis) selaras dengan tujuan pembelajaran. Melalui kombinasi penilaian proses, produk, dan ujian, dosen diharapkan memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang perkembangan mahasiswa, serta dapat memberikan penilaian yang adil, proporsional, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

2. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian merupakan alat yang digunakan dosen untuk mengumpulkan data secara sistematis mengenai pencapaian belajar mahasiswa. Dalam pembelajaran MKWK maupun MKPU, instrumen penilaian harus mampu menangkap tidak hanya aspek pengetahuan, tetapi juga sikap, nilai, dan keterampilan berpikir serta berkomunikasi. Oleh karena itu, penyusunan dan penggunaan instrumen perlu dirancang secara cermat, mengacu pada CPL dan CPMK, serta mengikuti prinsip-prinsip penilaian yang telah ditetapkan. Beberapa instrumen utama yang digunakan dalam penilaian MKWK maupun MKPU antara lain sebagai berikut.

a. Rubrik penilaian sikap dan partisipasi

Rubrik penilaian sikap dan partisipasi digunakan untuk menilai perilaku, keterlibatan, dan kontribusi mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Rubrik ini biasanya memuat sejumlah indikator yang relevan dengan karakter yang ingin dibangun melalui MKWK dan MKPU, seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, kemampuan menghargai pendapat orang lain, serta kesantunan dalam berkomunikasi. Setiap indikator disertai dengan deskripsi tingkat pencapaian (misalnya: sangat baik, baik, cukup, kurang) yang dirumuskan secara jelas dan operasional. Dengan rubrik ini, dosen memiliki pedoman yang lebih objektif dalam menilai sikap dan partisipasi mahasiswa, sehingga penilaian tidak hanya berdasarkan kesan umum. Rubrik juga dapat disosialisasikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan agar mereka memahami standar perilaku dan partisipasi yang diharapkan, sehingga penilaian sekaligus berfungsi sebagai sarana pembinaan sikap.

b. Rubrik penilaian tugas dan proyek

Rubrik penilaian tugas dan proyek digunakan untuk menilai produk kerja mahasiswa, baik yang dikerjakan secara individu maupun kelompok. Pada MKWK maupun MKPU, tugas dan proyek bisa berupa makalah, esai reflektif, laporan studi kasus, laporan studi lapangan, produk media edukasi, kampanye nilai, atau bentuk karya lain yang relevan dengan materi mata kuliah.

Rubrik penilaian tugas dan proyek umumnya memuat beberapa aspek penilaian, antara lain:

- 1) Kualitas isi, yang mencerminkan ketepatan, kedalaman, dan ketajaman analisis terhadap tema yang diangkat;
- 2) Keterkaitan dengan nilai-nilai MKWK, seperti keagamaan, Pancasila, kewarganegaraan, kebhinekaan, dan anti korupsi;
- 3) Keterampilan berpikir dan berkomunikasi, misalnya kemampuan menyusun argumen, sistematika penulisan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta kreativitas dalam penyajian;
- 4) Aspek proses, seperti kerja sama dalam kelompok, pembagian tugas, dan kepatuhan terhadap tenggat waktu.

Dengan rubrik ini, dosen dapat memberikan penilaian yang lebih rinci dan konsisten antar mahasiswa dan antar kelas. Di sisi lain, mahasiswa memperoleh gambaran yang jelas tentang kriteria keberhasilan dalam mengerjakan tugas, sehingga terdorong untuk merencanakan dan melaksanakan tugas secara lebih serius dan bertanggung jawab.

c. Kisi-kisi dan soal ujian yang mengukur ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan

Untuk menjamin bahwa ujian yang diselenggarakan benar-benar sejalan dengan capaian pembelajaran, dosen perlu menyusun kisi-kisi ujian sebelum menyusun naskah soal. Kisi-kisi memuat pemetaan antara CPMK, materi pokok, level kognitif (misalnya memahami, menerapkan, menganalisis), serta bentuk soal yang akan digunakan. Dengan adanya kisi-kisi, cakupan materi dan tingkat kesulitan soal dapat diatur secara proporsional dan sistematis.

Soal ujian dalam MKWK maupun MKPU dirancang untuk mengukur ranah pengetahuan (misalnya pemahaman konsep ajaran agama, Pancasila, konstitusi, bahasa ilmiah, dan konsep integritas), sekaligus mendorong munculnya keterampilan berpikir (analisis, sintesis, evaluasi). Hal ini dapat dilakukan melalui kombinasi soal objektif (pilihan ganda, benar-salah, isian) dan subjektif (uraian/esai, studi kasus, analisis teks). Untuk aspek sikap dan nilai, pengukuran secara langsung melalui ujian tertulis memang terbatas; karena itu, penilaiannya perlu dikombinasikan dengan instrumen lain, seperti rubrik sikap, refleksi

tertulis, atau studi kasus yang menuntut mahasiswa mengambil posisi dan memberikan argumentasi nilai.

Dengan menggunakan kisi-kisi yang jelas dan soal yang dirancang secara cermat, penilaian melalui ujian dapat memberikan informasi yang valid tentang ketercapaian pembelajaran, sekaligus menjadi bagian yang terintegrasi dengan teknik penilaian lain. Kombinasi rubrik dan kisi-kisi ujian menjadikan sistem penilaian MKWK lebih terstruktur, transparan, dan sejalan dengan prinsip penjaminan mutu akademik yang berlaku di universitas.

3. Kriteria dan Bobot Penilaian

Kriteria dan bobot penilaian merupakan komponen penting dalam penilaian pembelajaran MKWK maupun MKPU karena menentukan bagaimana nilai akhir mahasiswa dihitung dan ditetapkan. Setiap dosen pengampu MKWK maupun MKPU wajib menyusun komposisi penilaian yang jelas, proporsional, dan selaras dengan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK). Kriteria dan bobot tersebut harus tercantum dalam RPS dan disampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan awal sebagai bagian dari transparansi penilaian.

a. Contoh komposisi nilai (misal: kehadiran, tugas, UTS, UAS)

Komposisi nilai dapat bervariasi antar mata kuliah MKWK, namun pada prinsipnya harus mencerminkan keseimbangan antara penilaian proses, penilaian produk, dan penilaian sumatif. Berikut salah satu contoh komposisi nilai yang dapat digunakan dalam MKWK:

Komponen Penilaian	Bobot (%)	Keterangan
Kehadiran dan Parti-sipasi	20	Menilai kedisiplinan, kehadiran minimal sesuai aturan kampus, keaktifan dalam diskusi, dan sikap selama perkuliahan.
Kehadiran dan Parti-sipasi	20	Menilai kedisiplinan, kehadiran minimal sesuai aturan kampus, keaktifan dalam diskusi, dan sikap selama perkuliahan.
Tugas Individu/Kelompok	30	Mencakup esai reflektif, ringkasan bacaan, makalah, proyek, studi kasus, atau laporan pembelajaran lainnya.
Ujian Tengah Semester (UTS)	20	Menilai pemahaman mahasiswa terhadap materi setengah semester pertama.
Ujian Akhir Semester (UAS)	30	Menilai penguasaan mahasiswa terhadap keseluruhan capaian pembelajaran.

Komposisi tersebut dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing MKWK. Misalnya, mata kuliah berbasis proyek dapat memberikan bobot lebih besar pada penilaian tugas/proyek, sedangkan mata kuliah yang menekankan penguasaan konsep dapat memberikan bobot lebih besar pada ujian.

Dosen dianjurkan menggunakan rubrik penilaian yang jelas untuk setiap komponen agar mahasiswa mengetahui aspek apa yang dinilai dan bagaimana bobotnya dihitung.

b. Standar kelulusan MKWK dan MKPU

Standar kelulusan MKWK maupun MKPU mengikuti kebijakan akademik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan prinsip penilaian pendidikan tinggi. Beberapa ketentuan umum standar kelulusan meliputi:

- 1) Minimal nilai akhir untuk dinyatakan lulus MKWK maupun MKPU ditetapkan sesuai ketentuan universitas (setara nilai C atau ≥ 60 pada skala 0–100).
- 2) Persyaratan kehadiran: mahasiswa wajib memenuhi persentase kehadiran minimal sesuai ketentuan universitas (misalnya minimal 75% dari total pertemuan) untuk dapat mengikuti UAS.
- 3) Keharusan menyelesaikan tugas: mahasiswa harus mengumpulkan seluruh tugas wajib yang tercantum dalam RPS. Tidak menyerahkan tugas-tugas utama dapat menyebabkan nilai akhir tidak memenuhi standar kelulusan meskipun mahasiswa lulus ujian.
- 4) Ketaatan pada integritas akademik: pelanggaran seperti plagiarisme, mencontek, atau manipulasi data dapat dikenakan sanksi akademik, termasuk tidak lulus mata kuliah, terlepas dari nilai komponen lainnya.
- 5) Mahasiswa yang tidak mencapai standar minimal pada salah satu komponen utama (misalnya UAS atau proyek akhir) dapat diberikan kesempatan remedial sesuai kebijakan program studi atau fakultas.

Standar kelulusan MKWK dirancang untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami materi secara konseptual, tetapi juga menunjukkan sikap dan keterampilan yang sejalan dengan nilai-nilai dasar yang hendak dibangun melalui mata kuliah wajib kurikulum. Dengan demikian, mahasiswa yang dinyatakan lulus benar-benar telah mencapai kompetensi minimal yang diharapkan.

D. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1. Perencanaan Penilaian dalam RPS

Perencanaan penilaian dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa penilaian pembelajaran MKWK maupun MKPU berjalan sistematis, terukur, dan selaras dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, dosen tidak hanya menentukan “berapa kali” dan “bentuk apa” penilaian dilakukan, tetapi juga merancang keterkaitan yang jelas antara Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), materi, metode pembelajaran, dan teknik penilaiannya. Oleh karena itu, setiap RPS MKWK wajib memuat rancangan penilaian yang terstruktur, meliputi jenis penilaian, instrumen, indikator capaian, bobot, serta jadwal pelaksanaannya selama satu semester.

Dalam penyusunan RPS, dosen terlebih dahulu memetakan CPMK ke dalam indikator-indikator pembelajaran yang lebih operasional. Indikator inilah yang kemudian menjadi dasar penyusunan bentuk penilaian, misalnya penilaian sikap melalui observasi dan rubrik, penilaian pengetahuan melalui kuis, UTS, dan UAS, serta penilaian keterampilan berpikir kritis dan komunikasi melalui tugas, proyek, makalah, atau presentasi. Setiap bentuk penilaian yang direncanakan harus disebutkan dengan jelas dalam RPS, lengkap dengan bobot kontribusinya terhadap nilai akhir, sehingga komposisi nilai dapat dipahami oleh mahasiswa sejak awal perkuliahan.

Perencanaan penilaian dalam RPS juga mencakup penjadwalan penilaian sepanjang semester. Dosen perlu menyusun kapan kuis, tugas, UTS, dan UAS akan diberikan, serta kapan umpan balik akan disampaikan. Hal ini penting agar penilaian bersifat berkesinambungan dan memberi ruang bagi mahasiswa untuk memperbaiki diri sebelum sampai pada penilaian sumatif. Selain itu, RPS hendaknya mencantumkan secara eksplisit prinsip-prinsip penilaian yang digunakan (misalnya kejujuran akademik, bebas plagiarisme, dan keterbukaan terhadap klarifikasi nilai), serta rujukan terhadap rubrik dan instrumen penilaian yang akan dipakai. Dengan demikian, perencanaan penilaian dalam RPS menjadi dokumen acuan yang tidak hanya memandu dosen dalam melaksanakan penilaian, tetapi juga menjamin transparansi dan kepastian bagi mahasiswa mengenai standar dan prosedur penilaian yang berlaku pada MKWK maupun MKPU.

2. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian merupakan tahap operasional dari perencanaan yang telah dirumuskan dalam RPS. Pada tahap ini, dosen wajib memastikan bahwa seluruh bentuk penilaian—baik UTS, UAS, maupun tugas dan proyek dilaksanakan sesuai jadwal, prosedur,

dan prinsip penilaian yang telah ditetapkan. Pelaksanaan penilaian yang tertib, konsisten, dan transparan akan mendukung terciptanya iklim akademik yang adil serta memperkuat kepercayaan mahasiswa terhadap proses penilaian.

a. Jadwal dan tata cara pelaksanaan UTS dan UAS

Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) untuk MKWK maupun MKPU mengikuti kalender akademik dan ketentuan yang ditetapkan oleh universitas. Jadwal UTS dan UAS diumumkan secara resmi oleh pihak fakultas atau biro akademik, dan dosen wajib menyesuaikan rencana pembelajaran agar materi yang diujikan sesuai dengan cakupan yang direncanakan. Informasi mengenai waktu, tempat, bentuk ujian (tatap muka atau daring), serta materi yang diujikan perlu disampaikan kepada mahasiswa jauh hari sebelumnya, baik di kelas maupun melalui media resmi, misalnya LMS.

Tata cara pelaksanaan ujian harus menjamin integritas akademik. Pada ujian tatap muka, dosen atau pengawas perlu mengatur tempat duduk, memastikan hanya bahan yang diperbolehkan yang dibawa ke ruang ujian, serta memberikan instruksi yang jelas sebelum ujian dimulai. Pada ujian daring, diperlukan pengaturan teknis yang menjamin kejujuran peserta, misalnya dengan batasan waktu, pengaturan soal acak, penggunaan platform yang terekam, dan pengawasan daring sesuai kemampuan institusi. Selama ujian berlangsung, dosen/pengawas wajib mengawasi jalannya ujian dan menindak setiap indikasi kecurangan sesuai aturan akademik. Setelah ujian, lembar jawaban atau rekaman hasil ujian dikumpulkan dan disimpan dengan baik untuk kemudian dinilai secara cermat dan objektif.

B. Mekanisme Penilaian Tugas Dan Proyek

Penilaian tugas dan proyek dalam MKWK dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang jelas dan disosialisasikan sejak awal perkuliahan. Dosen perlu menjelaskan kepada mahasiswa jenis tugas yang akan diberikan (misalnya esai, makalah, laporan studi lapangan, produk media edukasi, atau kampanye nilai), tujuan tugas, kriteria penilaian, serta tenggat waktu pengumpulan. Penugasan sebaiknya dikaitkan langsung dengan capaian pembelajaran, sehingga mahasiswa memahami relevansi tugas dengan kompetensi yang ingin dicapai.

Pengumpulan tugas dapat dilakukan secara luring (cetak) maupun daring melalui LMS Edlink atau platform lain yang ditetapkan. Untuk menjaga integritas akademik, dosen dianjurkan menggunakan alat bantu pemeriksa plagiarisme jika tersedia, serta mendorong mahasiswa untuk mencantumkan sumber rujukan secara benar. Penilaian tugas dan proyek dilakukan dengan menggunakan rubrik penilaian yang telah disusun sebelumnya, sehingga

setiap aspek, seperti kedalaman analisis, ketepatan isi, sistematika, kreativitas, kerja sama (untuk tugas kelompok), dan penggunaan bahasa dapat dinilai secara konsisten.

Setelah penilaian selesai, dosen diharapkan memberikan umpan balik yang konstruktif, baik secara tertulis maupun lisan, agar mahasiswa mengetahui kelebihan dan kekurangan karyanya. Umpan balik ini penting sebagai bagian dari fungsi formatif penilaian, sehingga tugas dan proyek tidak hanya berujung pada angka nilai, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran dan perbaikan diri. Nilai tugas dan proyek yang telah ditetapkan kemudian direkap dan dimasukkan ke dalam sistem akademik sesuai jadwal yang berlaku, sehingga kelak dapat digabungkan dengan komponen penilaian lain (proses, UTS, UAS) untuk menghasilkan nilai akhir MKWK maupun MKPU.

3. Pengolahan dan Pelaporan Nilai

Pengolahan dan pelaporan nilai merupakan tahapan akhir dalam siklus penilaian pembelajaran MKWK maupun MKPU yang menentukan bagaimana hasil belajar mahasiswa didokumentasikan secara resmi dalam sistem akademik universitas. Tahap ini harus dilakukan secara cermat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena berkaitan langsung dengan hak akademik mahasiswa serta integritas data akademik universitas.

a. Prosedur Penginputan Nilai Ke Sistem Akademik

Setelah seluruh komponen penilaian (proses, tugas, proyek, UTS, UAS, dan komponen lain yang tercantum dalam RPS) dilaksanakan dan dinilai, dosen pengampu wajib menginput nilai di SIAKAD sesuai dengan komposisi bobot yang telah ditetapkan. Pengolahan nilai dilakukan melalui sistem (Siakad) secara transparan dan konsisten, menggunakan format yang sudah tersetting di SIAKAD UPMI. Dosen perlu memastikan bahwa penginputan nilai sudah dilakukan dengan benar, tidak ada komponen yang terlewat, dan setiap mahasiswa memperoleh nilai yang sesuai dengan kinerjanya.

Setelah proses penginputan nilai selesai, nilai akhir mahasiswa dimasukkan nilai akan dikunci dan selanjutnya terpublish dalam sistem akademik (SIAKAD UPMI) yang akan bisa dilihat dari akun peserta kelas maupun kaprodi serta BPM. Dalam proses penginputan, dosen harus:

- 1) Memastikan identitas mahasiswa (NIM, nama) sesuai dengan daftar peserta kuliah yang resmi;
- 2) Menginput nilai sesuai skala yang digunakan universitas (skala 0–100);

- 3) Memeriksa kembali (verifikasi) nilai yang telah diinput sebelum disimpan secara final, untuk menghindari kesalahan teknis seperti salah angka atau salah mahasiswa.

Jika terjadi kesalahan penginputan setelah nilai disimpan, dosen wajib mengikuti prosedur perbaikan nilai yang ditetapkan universitas, misalnya melalui pengajuan formulir perubahan nilai yang disertai alasan dan bukti pendukung. Dengan demikian, pengolahan dan penginputan nilai tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab dan integritas dosen sebagai penilai.

b. Batas Waktu Pengumpulan Dan Pengisian Nilai

Pelaporan nilai MKWK maupun MKPU harus mengikuti batas waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik universitas. Batas waktu ini mencakup:

- 1) Batas akhir pengumpulan tugas dan proyek oleh mahasiswa, yang ditetapkan dosen dan dicantumkan dalam RPS maupun Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) serta disosialisasikan sejak awal perkuliahan;
- 2) Batas waktu penginputan nilai UTS dan UAS dari dosen atau batas waktu finalisasi penginputan nilai pada sistem akademik yang ditetapkan oleh WR 1 dan Biro Akademik melalui kalender akademik UPMI.

Dosen berkewajiban menyelesaikan penilaian dan menginput nilai sebelum batas waktu tersebut, sehingga mahasiswa dapat segera mengetahui hasil belajarnya dan, bila diperlukan, mengajukan klarifikasi dalam waktu yang masih memungkinkan. Keterlambatan dalam pengisian nilai tidak hanya mengganggu proses administrasi akademik (misalnya cetak KHS, pendaftaran ulang, pengajuan beasiswa), tetapi juga merugikan mahasiswa dari sisi kepastian akademik.

Untuk menghindari keterlambatan, dosen dianjurkan:

- 1) Menyusun jadwal penugasan dan ujian yang realistis dalam RPS;
- 2) Menetapkan tenggat pengumpulan tugas yang memberi ruang cukup untuk proses penilaian;
- 3) Melakukan rekap dan verifikasi nilai secara bertahap, tidak menumpuk di akhir semester.

Dengan pengolahan dan pelaporan nilai yang tertib, tepat waktu, dan sesuai prosedur, proses penilaian MKWK maupun MKPU akan mendukung kelancaran layanan akademik universitas sekaligus menjamin hak mahasiswa untuk memperoleh informasi hasil belajar secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Umpan Balik (Feedback) kepada Mahasiswa

Umpan balik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penilaian pembelajaran MKWK maupun MKPU. Penilaian yang baik bukan hanya menghasilkan angka atau huruf mutu, tetapi juga memberikan informasi yang bermakna bagi mahasiswa untuk memahami posisi dirinya, memperbaiki kelemahan, dan menguatkan kelebihan. Oleh karena itu, dosen pengampu MKWK maupun MKPU berkewajiban memberikan umpan balik yang jelas, tepat waktu, dan konstruktif atas setiap bentuk penilaian yang dilakukan.

a. Penyampaian Hasil Penilaian Dan Refleksi

Hasil penilaian baik berupa nilai tugas, kuis, UTS, UAS, maupun penilaian proses perlu disampaikan kepada mahasiswa secara transparan dan secepat mungkin setelah penilaian dilaksanakan. Penyampaian hasil dapat dilakukan melalui sistem akademik atau SIAKAD UPMI

Selain menyampaikan angka nilai, dosen dianjurkan memberikan komentar kualitatif yang menjelaskan kekuatan dan kelemahan mahasiswa, misalnya di bagian isi, logika berfikir, penggunaan bahasa, atau sikap dalam diskusi. Komentar ini dapat disampaikan secara tertulis di tugas/lembar jawaban, pada kelas kuliah di LMS Edlink, ataupun secara lisan pada saat pembahasan di kelas.

Untuk memperkuat fungsi edukatif penilaian, dosen dapat mengarahkan mahasiswa melakukan refleksi terhadap hasil yang diperoleh. Refleksi dapat berupa:

- 1) Pertanyaan singkat seperti: “Bagian mana yang paling sulit?”, “Apa yang akan Anda perbaiki untuk tugas atau ujian berikutnya?”,
- 2) Tugas reflektif singkat mengenai proses belajar mereka (apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan).

Dengan demikian, hasil penilaian tidak berhenti sebagai informasi satu arah dari dosen, tetapi menjadi bagian dari dialog pembelajaran yang membantu mahasiswa mengenal dan mengembangkan dirinya.

b. Perbaikan (*Remedial*) Bila Diperlukan

Dalam hal terdapat mahasiswa yang belum mencapai standar minimal capaian pembelajaran atau nilai yang dipersyaratkan untuk lulus, program perbaikan (*remedial*) dapat diberikan sesuai dengan kebijakan akademik universitas dan program studi. Remedial bukan dimaknai sebagai “jalan pintas untuk menaikkan nilai”, tetapi sebagai kesempatan tambahan bagi mahasiswa untuk memperbaiki pemahaman dan kinerjanya.

Bentuk remedial dapat berupa:

- 1) Tugas tambahan yang secara khusus dirancang untuk memperkuat penguasaan materi yang lemah;
- 2) Ujian perbaikan untuk materi tertentu, apabila dinilai relevan dan diatur dalam peraturan akademik;
- 3) Kegiatan bimbingan atau konsultasi terbatas bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan serius dalam memahami materi atau mengelola proses belajar.

Dosen perlu menjelaskan syarat dan prosedur remedial secara jelas: siapa yang berhak mengikuti, batas waktu pelaksanaan, bentuk kegiatan, serta bagaimana hasil remedial akan mempengaruhi nilai akhir. Pelaksanaan remedial harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan integritas akademik, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa nilai dapat “dinaikkan” tanpa usaha nyata dari mahasiswa.

Melalui umpan balik yang berkualitas dan mekanisme remedial yang terarah, penilaian pembelajaran MKWK maupun MKPU diharapkan benar-benar berfungsi sebagai sarana pembinaan, bukan sekadar seleksi. Mahasiswa didorong untuk melihat penilaian sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh, sementara dosen menjadikannya sebagai alat untuk terus meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

5. Mekanisme Keberatan dan Klarifikasi Nilai oleh Mahasiswa

Mekanisme keberatan dan klarifikasi nilai disediakan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak akademik mahasiswa sekaligus wujud akuntabilitas dosen dan institusi. Dalam konteks pembelajaran MKWK, mahasiswa berhak memperoleh penjelasan yang memadai apabila merasa terdapat ketidaksesuaian antara hasil penilaian yang diterima dengan usaha yang telah dilakukan atau dengan kriteria penilaian yang telah disepakati. Di sisi lain, mekanisme ini juga menjadi sarana untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem penilaian dan mencegah munculnya prasangka yang tidak berdasar.

Secara umum, mekanisme keberatan dan klarifikasi nilai dapat dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- 1) Klarifikasi awal secara langsung kepada dosen pengampu.

Langkah pertama yang harus dilakukan mahasiswa adalah mengajukan permohonan klarifikasi secara langsung kepada dosen pengampu MKWK maupun MKPU, dalam batas waktu yang wajar setelah nilai diumumkan (misalnya 1–2 minggu). Klarifikasi dapat dilakukan melalui:

- a) Pertemuan tatap muka terjadwal,

- b) Konsultasi setelah perkuliahan,
- c) Atau melalui media resmi seperti email institusi atau pesan pada LMS.

Pada tahap ini, mahasiswa didorong untuk menyampaikan pertanyaannya secara sopan dan fokus pada aspek akademik, misalnya: kesesuaian skor dengan rubrik, komponen nilai yang belum dipahami, atau perbedaan antara nilai yang tercantum dan nilai yang dirasakan. Dosen berkewajiban menjelaskan dasar pemberian nilai, menunjukkan rubrik penilaian, serta jika relevan memperlihatkan kembali lembar jawaban atau tugas yang telah dinilai.

- 2) Peninjauan kembali (*review*) penilaian oleh dosen. Jika setelah klarifikasi awal masih terdapat keraguan yang masuk akal, dosen dapat melakukan peninjauan kembali (*review*) terhadap penilaian yang telah diberikan. Review ini dilakukan dengan menggunakan kriteria dan rubrik yang sama seperti penilaian awal. Bila ditemukan kesalahan teknis (misalnya penjumlahan skor yang keliru atau input nilai yang salah), dosen wajib memperbaiki nilai tersebut dan melaporkannya sesuai prosedur yang berlaku di program studi/fakultas.

Hasil review, baik ada perubahan nilai maupun tidak, perlu disampaikan kepada mahasiswa dengan penjelasan yang transparan. Dengan demikian, mahasiswa mengetahui bahwa keberatannya telah dipertimbangkan secara serius dan profesional.

- 3) Pengajuan keberatan formal melalui program studi/fakultas. Apabila mahasiswa masih merasa belum puas setelah proses klarifikasi dan review di tingkat dosen, dan memiliki alasan akademik yang kuat, ia dapat mengajukan keberatan formal melalui program studi atau fakultas sesuai prosedur yang ditetapkan universitas. Pengajuan keberatan ini biasanya dilakukan secara tertulis, dengan melampirkan:

- a) Identitas mata kuliah dan dosen pengampu,
- b) Rincian nilai yang dipermasalahkan,
- c) Alasan keberatan yang bersifat akademik,
- d) Bukti pendukung (misalnya tugas, lembar jawaban, atau dokumentasi lain yang relevan).

Program studi/fakultas kemudian dapat membentuk tim kecil atau menunjuk pejabat akademik yang berwenang untuk menelaah keberatan tersebut. Hasil telaah dapat berupa: penguatan keputusan penilaian awal, rekomendasi review ulang, atau bila sangat diperlukan penyesuaian nilai sesuai ketentuan yang berlaku.

- 4) Batasan, etika, dan dokumentasi. Mekanisme keberatan dan klarifikasi nilai harus dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi etika akademik. Mahasiswa diharapkan menyampaikan keberatan dengan bahasa yang sopan, menghargai otoritas akademik dosen, dan berfokus pada substansi penilaian, bukan menyerang pribadi. Dosen, di sisi lain, wajib bersikap terbuka, tidak defensif, dan siap memberikan penjelasan secara objektif.

Semua proses klarifikasi dan perubahan nilai, jika ada, perlu didokumentasikan oleh dosen dan/atau program studi sebagai bagian dari rekam jejak akademik dan bahan evaluasi penjaminan mutu. Dokumentasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan nilai dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya mekanisme keberatan dan klarifikasi nilai yang jelas, pembelajaran MKWK maupun MKPU di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia diharapkan tidak hanya menghasilkan penilaian yang akurat dan adil, tetapi juga membangun budaya dialog, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama antara dosen dan mahasiswa dalam proses akademik.

6. Dokumentasi dan Arsip Instrumen serta Hasil Penilaian

Dokumentasi dan pengarsipan instrumen serta hasil penilaian merupakan bagian penting dari tata kelola akademik yang baik dan akuntabel dalam penyelenggaraan MKWK. Seluruh dokumen terkait penilaian, seperti RPS, kisi-kisi, naskah soal, rubrik penilaian, lembar observasi sikap dan partisipasi, lembar jawaban ujian, tugas, proyek, rekap nilai, serta bukti umpan balik kepada mahasiswa terdokumentasi di LMS Edlink atau disimpan secara tertib dan sistematis. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti bahwa proses penilaian telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, serta sebagai rujukan ketika dilakukan audit akademik, akreditasi, atau peninjauan mutu pembelajaran oleh pihak internal maupun eksternal.

Pada tingkat dosen, penyimpanan instrumen dan hasil penilaian dapat dilakukan dalam bentuk fisik (arsip cetak) maupun digital (file tersimpan pada SIAKAD, maupun di LMS Edlink). Pada tingkat program studi, fakultas, dan lembaga penjaminan mutu, rekap nilai dan sampel instrumen penilaian MKWK maupun MKPU perlu dihimpun sebagai bagian dari evaluasi mutu akademik. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar untuk mengevaluasi konsistensi penerapan standar penilaian, kesesuaian antara CPL/CPMK dan bentuk penilaian, serta tren capaian nilai mahasiswa dari waktu ke waktu. Pengelolaan arsip yang baik juga

memudahkan proses penyusunan laporan akreditasi dan pelaporan mutu lainnya. Dengan demikian, dokumentasi dan arsip penilaian tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen penting dalam siklus penjaminan mutu berkelanjutan dan pengembangan kualitas pembelajaran MKWK maupun MKPU di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Buku Pedoman Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) dan Mata Kuliah Penciri Universitas (MKPU) di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia ini disusun sebagai rujukan komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembelajaran MKWK maupun MKPU. Di dalamnya telah diuraikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis penyelenggaraan MKWK dan MKPU; capaian pembelajaran dan ruang lingkup materi setiap mata kuliah; tata kelola proses pembelajaran; serta mekanisme penilaian yang sah, objektif, dan akuntabel. Seluruh komponen tersebut dirancang untuk memastikan bahwa MKWK maupun MKPU benar-benar memainkan peran strategis dalam penguatan jati diri kebangsaan, penginternalisasian nilai-nilai keagamaan dan Pancasila, serta pembinaan integritas dan karakter mahasiswa. Dengan demikian, pedoman ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi instrumen penting dalam upaya sistematis membentuk insan akademik yang utuh.

Urgensi pedoman ini terletak pada fungsinya sebagai acuan baku yang menyatukan arah dan praktik penyelenggaraan MKWK maupun MKPU di seluruh fakultas dan program studi. Tanpa pedoman yang jelas, pelaksanaan MKWK berisiko berlangsung secara parsial, tidak konsisten, dan sulit diukur kontribusinya terhadap capaian pembelajaran lulusan. Melalui pedoman ini, diharapkan terdapat keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, sekaligus keterkaitan yang kuat dengan standar nasional pendidikan tinggi dan kebijakan universitas. Pada saat yang sama, pedoman ini menjadi wujud komitmen institusional Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam menjawab tantangan degradasi moral, intoleransi, kekerasan, dan korupsi di tengah dinamika era digital dan globalisasi.

Kebermaknaan pedoman ini sangat bergantung pada kesungguhan dosen pengampu MKWK maupun MKPU dalam mengimplementasikannya. Dosen diharapkan menggunakan pedoman ini sebagai panduan utama dalam menyusun RPS, memilih metode dan media pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang inklusif dan dialogis, serta menerapkan penilaian yang mendidik dan berorientasi pada pembentukan karakter. Kreativitas dan keteladanan dosen menjadi faktor penentu agar nilai-nilai keagamaan, Pancasila, kebhinekaan, dan anti korupsi tidak hanya berhenti pada tataran wacana, melainkan hidup dalam suasana kelas dan perilaku keseharian mahasiswa. Dengan demikian,

implementasi pedoman ini menuntut kolaborasi erat antara dosen, program studi, fakultas, dan lembaga penjaminan mutu internal.

Menyadari bahwa regulasi pendidikan tinggi, tuntutan pemangku kepentingan, serta dinamika sosial dan teknologi terus berkembang, pedoman ini dirancang sebagai dokumen yang dapat dan perlu ditinjau secara berkala. Peninjauan dan pemutakhiran pedoman MKWK dan MKPU akan dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan peraturan perundang-undangan, hasil evaluasi internal, temuan audit mutu, serta masukan dari dosen dan mahasiswa. Dengan pola demikian, pedoman ini diharapkan tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan zaman, tanpa kehilangan pijakan pada visi, misi, dan nilai dasar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

Akhirnya, melalui penyusunan dan pelaksanaan Buku Pedoman MKWK dan MKPU ini, UPMI mengajak seluruh sivitas akademika untuk bersama-sama memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat pembentukan insan yang berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing. MKWK maupun MKPU diharapkan menjadi jantung pembelajaran nilai yang menuntun mahasiswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial. Semoga pedoman ini dapat dimanfaatkan secara optimal, menjadi landasan kerja yang kokoh bagi para dosen, dan pada akhirnya berkontribusi nyata dalam mewujudkan lulusan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang siap mengabdikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara dengan penuh tanggung jawab dan kehormatan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.